

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) DI DESA PARARRA KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

ARLS

Nim 16 0401 0240

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

**PEMBERDAYAAN MASYAAKAT MELALUI BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PARARRA KECAMATAN
SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ARI S

16 0401 0240

Pembimbing:

Dr. Akhmad Syarief Iskandar, S.E., M.M

Mujahidin, Lc., M.EI

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ari S
NIM : 16 0401 0240
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 November 2022
Yang membuat pernyataan,



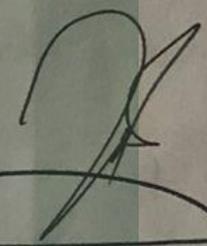
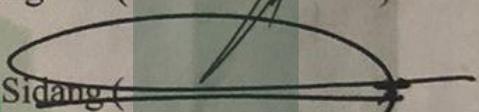
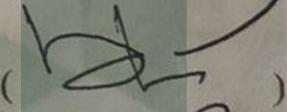
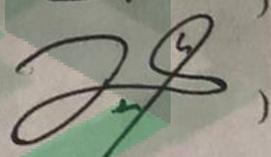
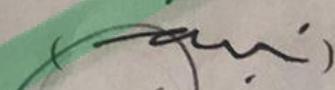
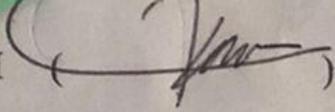
Ari S
Ari S
16 0401 0240

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Ari S, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0240, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 08 September 2022

TIM PENGUJI

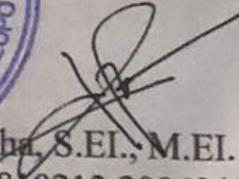
- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Burhan Rifuddin S.E, M.M. | Penguji I | () |
| 4. M. Ikhsan Purnama S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji II | () |
| 5. Dr Akhmad Syarief Iskandar S.E., M.M. | Pembimbing I | () |
| 6. Mujahidin Lc., M.El. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002


Dr. Fasiha, S.El., M.El.
NIP. 19810213 200604 2 002



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”** tepat waktu dan dengan hasil yang sesuai dengan harapan

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi banyak rintangan dan kesulitan. Namun, dengan pertolongan Allah *Subhanahu Wata'ala*, ketekunan dan ketabahan penulis yang disertai dengan dukungan dan doa dari berbagai pihak sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sabari dan Ibu Hasmani yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materil bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Sungguh penulis sadar bahwa penulis tidak mampu membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, dalam hal ini Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Muhaemin, M.A yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Ilham, S.Ag.,M.A., yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dalam hal ini Ibu Dr. Fasiha, S.El., M.El., Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Bapak Kadir Arno, SE., Sy. M.Si., beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Pembimbing, dalam hal ini Bapak Dr. Akhmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Bapak Mujahidin, Lc., M.El yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo. Dalam hal ini Bapak Madehang,S.Ag., M.Pd beserta segenap Staf yang telah membantu dan memberikan peluang penulis

dalam mengumpulkan buku-buku serta melayani penulis dengan baik untuk keperluan studi kepustakaan dan penulisan skripsi ini dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membantu kelancaraan pegurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelar SE.

6. Kepala Desa Pararra dan staff, yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian.
7. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
8. Seluruh rekan-rekan pengurus HMPS Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman rekan se-posko KKN yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada diri saya, yang telah percaya bahwa saya bisa melakukan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Teriring doa, semoga segala amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai pahala di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala* serta senantiasa dalam Rahmat dan lindungan-Nya *Aamiin Allahumma Aamiin*

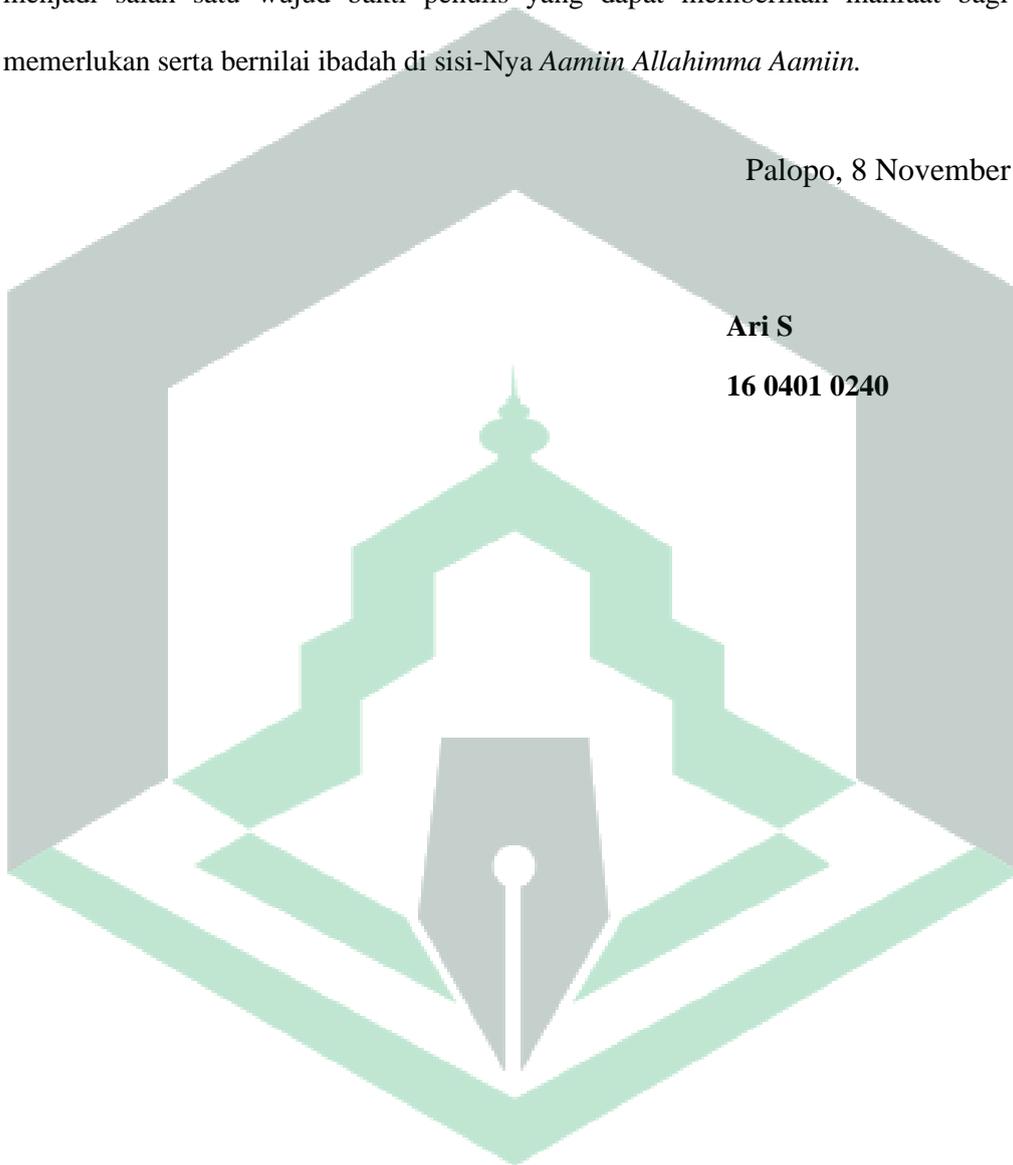
Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala*. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya *Aamiin Allahimma Aamiin*.

Palopo, 8 November 2022

Ari S

16 0401 0240



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. *Madaun*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو... اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

أَلْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

a huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*
بِاللَّهِ : *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

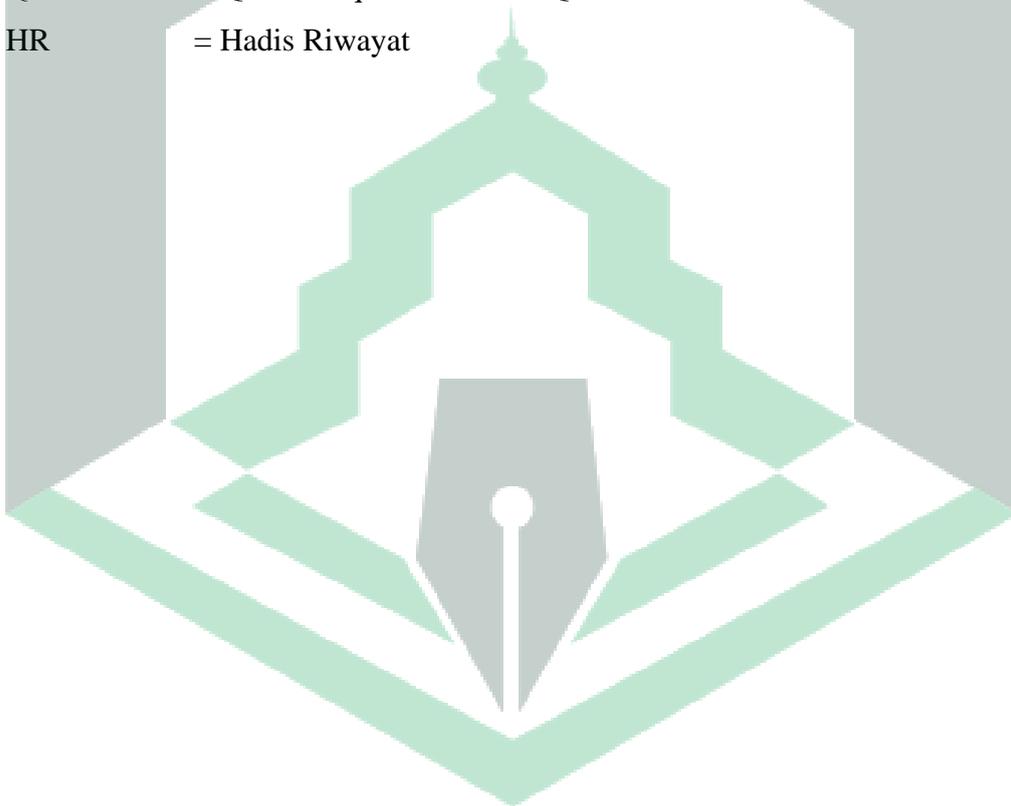
Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penulisan	
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	
B. Kajian Pustaka	
C. Kerangka Pikir	
BAB III JENIS PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	
B. Lokasi Penelitian	
C. Definisi Operasional	
D. Sumber Data	
E. Instrumen Penelitian	
F. Teknik Pengumpulan Data.....	
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Data	
B. Pembahasan	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkembangan Desa Dari Masa ke Masa	
Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2021	
Tabel 3.4 Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Pekerjaan	
Tabel 3.5 Responden Berdasarkan analisis pendidikan	
Tabel 3.6 Responden Angka Putus Sekolah	
Tabel 3.7 Jumlah Sekolah dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan	
Tabel 3.8 Perkembangan Kondisi Kesehatan tahun 2017-2020	
Tabel 4.2 Unit Usaha Simpan Pinjam	



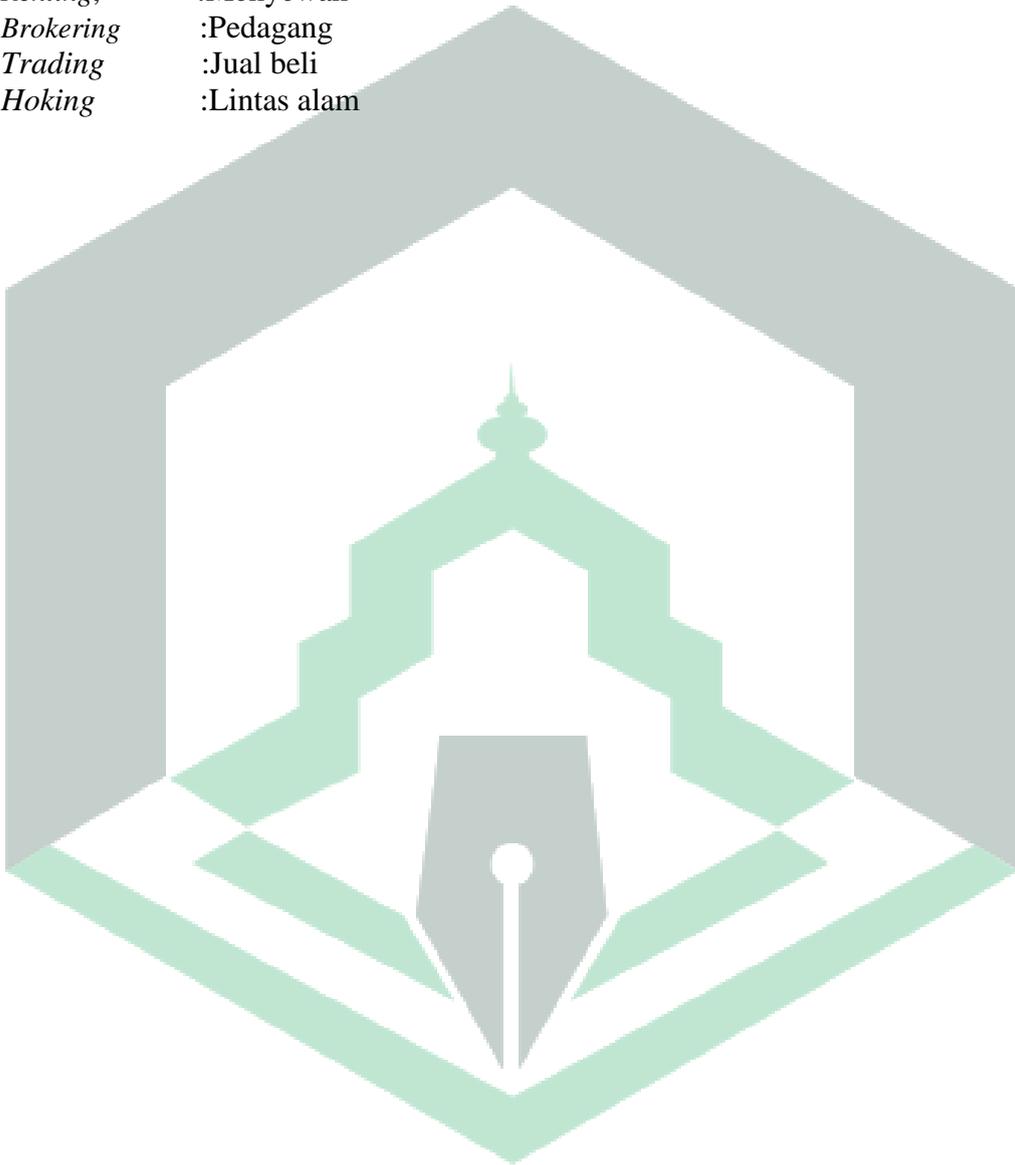
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bumdes.....



DAFTAR ISTILAH

<i>Serving</i>	:Porsi
<i>Banking</i>	:Perbankan
<i>Renting,</i>	:Menyewah
<i>Brokering</i>	:Pedagang
<i>Trading</i>	:Jual beli
<i>Hoking</i>	:Lintas alam



ABSTRAK

Ari S, 2022“*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Institut Agama Islam Negeri Palopo. di Bimbing Oleh Bapak Dr. Akhmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Bapak Mujahidin, Lc., M.EI

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui system pengelolaan BUMDes dan Efektitasnya di Masyarakat Pararra. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif melalui pendeskripsian kat-kata. Serta pengambilan data dilakukan dengan cara *Field Reaserch*. Hasil Penelitian ini yaitu : 1) Sistem BUMDes di Desa Pararra memiliki sejarah panjang keberhasilan dalam mengatasi tantangan. Strategi ini terdiri dari arah, tindakan, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah salah satu strategi sebagai bagian dari proses mendidik karyawan yang dapat digunakan untuk membedakan antara karyawan yang dibangun oleh suatu organisasi. Namun, tidak ada di lapangan yang relevan dengan populasi massa. Akibat struktur sistem BUMDes di Pararra yang didasarkan pada strategi yang dikembangkan oleh karyawan, hubungan tersebut tidak terlalu efektif, tetapi dapat digunakan untuk menganalisis berbagai strategi yang direncanakan, berbagai permasalahan yang ada. tidak dapat diatasi.2) Efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dianalisis oleh BUMDes untuk mengidentifikasi perekonomian Desa Pararra secara keseluruhan, meskipun tidak terkait dengan analisis ekonomi Desa Pararra. Pemberdayaan ekonomi BUMDes tidak efektif karena faktor-faktor berikut: Pemanfaatan BUMDes oleh unit yang saat ini digunakan dan strategi evaluasi yang gagal Selain itu, ketidak mampuan BUMDes dalam perekonomian diperparah dengan campur tangan penduduk desa. BUMDes Ta Dung Maupa di Desa Pararra memiliki sisi unit usaha yang dikelola dan memiliki unit sisi usaha yang berasal dari pengelolanya.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa saat ini tidak lagi ditempatkan sebagai latar belakang tetapi sudah berubah menjadi halaman depan negara Indonesia. Hal tersebut tentunya dipengaruhi karena adanya UU Nomor .6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Desa mengembang cara pandang dan konsep yang baru tentang kebijakan tatakelola desa berskala nasional. Undang-undang yang telah di legalkan sekitar akhir 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, dan mengedepankan Asas pengenalan dan subsidiaritas di desa. Adapun tujuan dari adanya UU tentang

Desa yang selaras dengan visi serta misi tentang perencanaan pembangunan yang berskala nasional 2014 sampai 2019 yang bersumber pada keinginan bapak Presiden Joko Widodo yang menginginkan tercapainya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, serta berkepribadian yang berlandaskan gotong-royong.¹Proses ini mementingkan adanya pengakuan seseorang akan kesanggupan dana yang dimiliki objek secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat yang kurang mampu, atau masyarakat yang memerlukan bantuan dari pemerintah, karena kurangnya ekonomi masyarakat untuk kebutuhan hidupnya.²

¹ Kusuma dan Dhayu citra, "pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes) (studi pada unit simpan pijam BUMDes Maju makmur Desa minggir sari kecamatan anigoro, kabupaten blitar), universitas Brawijaya, tahun 2018.

² Ajisman Efendi (2018) Skripsi "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Bum des) Di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sebagai kelompok politik terkecil di pemerintahan, desa mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai suatu lambing pembangunan nasional. Desa mempunyai berbagai potensi tidak hanya dari segi banyaknya jumlah penduduk tetapi juga ketersediaan akan sumber daya alam yang melimpah. Ketika potensi yang dua ini dapat dikelola secara maksimal, maka akan membawakan hasil efek kesejahteraan bagi para penduduk desa. Tetapi realitasnya bahwa sejauh ini pembangunan yang berada di Desa masih mempunyai banyak kelemahan.

Ada beberapa kelemahan pembangunan ditingkat Desa diantaranya disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang tidak berkualitas tetapi disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dengan meluncurkan berbagai jenis dana untuk program pembangunan di desa, salah satunya yaitu melalui BUMDes atau biasa disebut Badan Usaha Milik Desa.³

BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang di kelola langsung secara mandiri oleh desa. Namun di Desa yang masih berkembang banyak saja hal yang menjadi kendala mulai dari sumber daya manusia yang kurang hingga kesadaran para masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes, menyadari bahwa pentingnya pengelolaan dan pengembangan BUMDes pemerintah betul-betul harus memperhatikan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya BUMDes.⁴

BUMDes salah satu asset besar yang dimiliki oleh setiap desa dalam

³Puspayanti, Ni Luh Putu Ayu Dia. "Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran Bumdes Untuk kemandirian Desa pada Desa di Kabupaten Jembrana" e-Journal, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018. <https://openknowledgmaps.org>.

⁴Didarahmadanik, "peranBUMDesdalam pemberdayaan masyarakat desa Cokro Kembang kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan", universitas 17 agustus 1945 surabaya.

mengembangkan potensi desanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa yang berdampak pada masyarakat dan negara. Hampir disetiap Desa memiliki bumdes dimana seluruh atau sebagian modalnya yang di miliki oleh desa. BUMDes lahir sebagai salah satu pendekatan baru dalam meningkatkan ekonomi Desa. Apabila Desa sudah bisa secara mandiri menyediakan kebutuhan masyarakatnya, maka Desa telah mampu mensejahterakan masyarakatnya sekaligus memberikan pendekatan pada dirinya. Desa merupakan sistem kemasyarakatan bangsa yang kuat dalam membangun sistem ekonomi, politik dan budaya.⁵

Adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan setiap masyarakat desa dapat merubah penghasilan keluarga dengan menjadi anggota BUMDes hingga menjadi pelaku Usaha dengan memaksimalkan Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui BUMDes diharapkan dapat memeberikan efek kesejahteraan masyarakat sehingga kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi. yang selama ini menjadi permasalahan dalam rumah tangga.⁶

BUMDes merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan keuangan Desa, kulalitas Desa dan menunjang pendapatan masyarakat desa. Tidak menutup kemungkinan pengelolaan BUMDes yang baik disuatu Desa dapat memberikan pinjaman modal kepada pihak luar melalui pemerintah desa maupun pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan(UUD 32 thn 2004 tentang pemerintahan daerah) berdasarkan asuransi ini

⁵Munawaroh,"Analisis pengembangan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milikdesa(studikasusDesaMajasariKecamatanSliyegKabupatenIndraMayu)",UINSyarifHidayatullah, Tahun2019.

⁶Didarahmadanik,"peranBUMDesdalampemberdayaanmasyarakatdesaCokroKembangkeca matan Ngadirojo Kabupaten Pacitan",universitas17 agustus1945 surabaya

makaperlu adanya perhatian oleh pemerintah pusat terhadap perkembangan BUMDes melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sehingga dapat memberikan peluang kepada masyarakat maupun pemerintah Desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi Desa yang dimiliki.

Masyarakat Desa seharusnya memiliki sifat solidaritas, kolektif dan rasa percaya diri dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes sehingga dapat berjalan dengan baik dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tradisi Desa inilah yang menjadi pegangan fundamental dalam mendirikan dan melaksanakan BUMDes sehingga dalam pengelolaan dan pengembangannya bisa terwujud dengan baik.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk kesejahteraan secara mandiri dan kebutuhan warga Desanya. Desa telah menjadi suatu sistem kemasyarakatan yang kuat dalam mengembangkan sistem sosial, budaya, dan politik demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan maka seharusnya potensi daya alam harus digalidkan dikembangkan dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Sebagai proses didalam pembangunan pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau memaksimalkan keberadaan kelompok masyarakat lemah, di dalam memberdayakan masyarakat berupaya untuk mendorong harkat serta martabat pada elemen masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini belum mampu untuk menghindari diri dari jeratan kemiskinan dan ketertinggalan. Disisi lain pemberdayaan masyarakat memampukan dan mendirikan masyarakat sehingga dapat melahirkan perubahan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam persyaratan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa secara jujur dapat disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai suatu bisnis ekonomi serta bisnis sosial. Hal ini penting untuk diterapkan karena bisa sebagai pemberdayaan atau peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.⁷

Desa Pararra kecamatan sabbang Kabupaten Luwu Utara, merupakan desayang dikenal memiliki sumber daya alam yang sangat indah, terhampar sepanjang Desa pegunungan dan persawahan yang sangat asri dimata. Desa Pararra sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2016 dengan bentuk usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan dan pemberdayaan usaha berbasis alam seperti pembuatan gula aren serta pengelolaan wisata.

Pemerintah Desa Pararra mendirikan BUMDes atas Musyawarah Desa atas pendayagunaan potensial yang melimpah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Desa Pararra merupakan Daerah yang berada dibawah kaki pegunungan yang jauh dari perkotaan maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk mendirikan atau membangun BUMDes di Daerah tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan daerah tersebut.⁸

Untuk meningkatkan perekonomian di Desa Pararra maka BUMDes memberdayakan masyarakat dengan mengelola potensi yang ada di wilayah tersebut. Mayoritas mata pencaharian penduduk disana mengelola perkebunan, dan persawahan. Sebelum adanya BUMDes masyarakat mengelola hasil perkebunannya seadanya dan di jual dengan harga yang murah namun dengan adanya BUMDes

⁷Harun Blongkod s.pd.,MSA dan Herlina Rasjid,SE.,MM. "Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo", universitas Gorontalo prodi Akutansi Fakultas Ekonomi, Tahun 2019

⁸Hasil Observasi di Desa Pararra Kecamatan sabbang. 8 April 2022.

masyarakat diberikan pelatihan dan diberikan modal untuk mengelola hasil perkebunannya agar dapat menambah nilai jual.⁹

Pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes saat ini tentunya tidak berjalan dengan baik karena di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, usaha yang terbatas, interfensi pemerintah, kurangnya modal usaha dan partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan penelitian terdahulu, banyak peneliti yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan BUMDes. Namun, penelitian yang telah di lakukan sebelumnya belum memaparkan fenomena atas BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di wilayah pedesaan, sehingga memberikan informasi belum jelas kepada para pembaca secara menyeluruh. Penelitian yang di lakukan penulis mengarah kepada konsep pemberdayaan ekonomi terhadap peran BUMDes.

Melihat kondisi dan realita yang ada di Desa Pararra sebagai bagaian dari Desa yang berada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan membandingkan beberapa penjelasan yang ada di atas terkait masalah fungsi dan peran BUMDes itu berbanding terbalik dengan harapan masyarakat yang ada didesa tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PARARRA KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana system Pengelolaan BUMDes di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

⁹ HasilPraSurveyUpayaPemberdayaanMasyarakatMelaluiBUMDes

- b. Bagaimana efektivitas BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengetahui system pengelolaan BUMDes di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
- b. Mengetahui efektivitas BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat membantu penambahan literatur tentang efektivitas BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat.
 - b. Secara praktis diharapkan sebagai bahan evaluasi BUMDes di Desa Parrara Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
- 1) Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penulis tentang BUMDes
 - 2) Bagi Akademisi, diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk teman peneliti yang lainnya dan juga sebagai bahan pengetahuan tentang BUMDes
 - 3) Bagi Instansi Terkait, diharapkan juga dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk BUMDes yang ada di Desa Parrara kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari judul yang penulis angkat itu sebelumnya telah ada beberapa orang yang telah melakukan penelitian seperti:

1) Romi Saputra, dalam Jurnal Manajemen Pemerintahan (S3). Institut pemerintahan dalam Negeri, yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai implementasi Ekonomi Kreatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa BUMDes Jalancagak meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa dalam memberdayakan masyarakat.

2) Jurnalaksi (Akuntansi dan Informasi) (S3), dengan Judul “Pengembangan Desa Mandiri melalui BUMDes dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Tomboro Kecamatan Keras Kabupaten Magetan). Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi pengembangan mandiri, dengan kesimpulan akhir bahwa pemanfaatan BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Tomboro.

3) Rachmat Kriantono, YunFitriati, dkk Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat (S3), dengan judul “Penguatan Kapasitas Tata Kelola Keuangan dan Komunikasi pada Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gendro Pasuruan”. Penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan ini mampu memberikan

pemahaman dan kemampuan aplikasi tentang pengelolaan laporan keuangan dan manajemen komunikasi sehingga BUMDes dapat mandiri dalam mengembangkan potensi masyarakat.

4) KKN-PPM (S3), dengan judul “Penguatan ekonomi desa melalui BUMDes di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah *participatory rural appraisal* (PRA). Kesimpulan dari hasil yang diperoleh dari pemberdayaan adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan pembangunan khususnya penguatan ekonomi masyarakat melalui peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat dalam berbagai sector usaha yang telah di bentuk.

5) Boedijono, Gali Wijaksono, dkk Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (S3), dengan Judul “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikabupaten Bondowoso. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif dan Kualitatif. Hasil Penelitian Ini secara Umum bahwa Desa yang berada di Kabupaten Bondowosotelah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun masih belum tertib dalam administrasi, sehingga sering terlambat dalam pencairan.

6) Nurul Qomariah Jurnal Pengabdian Masyarakat (S3), dengan Judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Soft Skill Pembuatan Krupuk Samiler Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Bondowoso. Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini bertitik tolak pada pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan softskill pembuatan krupuk samiler dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga di Kabupaten Bondowoso. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemberdayaan kaum perempuan

dengan memberikan ketrampilan yang dapat menambah pendapatan keluarga.

7) Fajar subehi, asma Luthfi, dkk Jurnal Umbara (S3), dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlihat, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan asset dan potensi Desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidaklah sederhana. Ada beberapa factor yang menghambat dan mendorong keberhasilan upaya ini, diantaranya factor teknologi, SDM dan Persaingan Usaha. Namun, kolaborasi pemerintah dan wargadesa yang solid terbukti mampu mengatasi hambatan dan menjadikan BUMDes sebagai fasilitator dalam pemberdayaan ekonomi warga.

8) Adib Susilo Jurnal Ekonomi Syariah (S2), dengan Judul “Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam”. Model penelitian yang digunakan adalah model pembangun nasional dan model pemberdayaan masyarakat islam dengan pendekatan *structural*. Kesimpulan dari peneliti bahwa Islam dalam pemberdayaan masyarakat berasaskan pada beberapa prinsip yang telah rasul terapkan sejak pertama kali wahyu diturunkan untuk menyebarkan agama islam. Dalam pemberdayaan itu sendiri digunakan pendekatan parsial-kontinuitas pendekatan *structural* agar tercapai 3 dimensi.

9) Binti Isnaul Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Tunggawir Kalidawir Tulung Agung”. Dalam penelitian ini

bertujuan untuk Untuk mengetahui proses dan tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes, dampak positif dan negatif dari proses pemberdayaan masyarakat beserta kendala dan solusi dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan model analisis studi kasus dengan teknik analisis data reduksi interview dan dokumentasi. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian melalui BUMDes. Penggalan potensi desa dibuka beberapa unit usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat, dengan cara pengelolaan distribusi pasar, koperasi, simpan pinjam, dan budidaya ternak. Strategi selanjutnya yang digunakan adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat, juga dilakukan penyusunan strategi-strategi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Dampak pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.¹⁰

10) Ratna Azis Prasetyo dalam penelitian ini berjudul “Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk pola pemanfaatan dana BUMDes dengan cara mengambil studi kasus di Desa pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Desa yang menerapkan system BUMDes. Penelitian deskriptif, pengumpulan data

¹⁰Binti Isnaul Hasanah, (2019) “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Tunggangri Kalidawar Tulungagung.” (Binti Isnaul Hasanah, Program Studi Ekpnomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Tulungagung), Diakses pada tanggal 29 Januari 2020 puku 116.43 wita.

yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara yang terstruktur menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dengan cara wawancara secara langsung dengan masyarakat yang berdomisili di Desa Pejambon Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 50 orang guna mengetahui secara langsung seberapa partisipasi masyarakat serta kontribusi BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat. Pengumpulan data sekunder yang di gunakan dalam BUMDes dan bagaimana kondisi ekonomi-sosial masyarakat di lokasi itu yang bisa di dapatkan dari BPS, dari berbagai kajian dan dokumentasi yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam mengembangkan BUMDes masih sangat kurang. Dalam hal ini terlihat pengetahuan masyarakat masih rendah terhadap program-program BUMDes, kegiatan BUMDes yang dilakukan di Desa Pejambon masih kurang di pahami oleh masyarakat. Di dalam penelitian ini 54% dan 66% yang mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan dari program BUMDes hanya 34% saja yang mengaku pernah mendapatkan bantuan.¹¹

B. Kajian Pustaka

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pada hakikatnya upaya-upaya pembangunan di tingkat komunitas memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesejahteraan dengan beragam stakeholders lainnya. Oleh karena itu, semua stakeholders sebagai pelaku

¹¹P,irma irawati dan Dina Kurniawati, *meningkatkan peran Bumdes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng*”, *Jurnal Abdiraja*, Vol 2, No. 2, September 2019. <https://app.dimensions.ai/discovery/publication>.

perubahan sebagai perubahan dalam proses pembangunan berupa memberdayakan warga komunitas (dari kekurangan berdaya menjadi lebih berdaya) baik dari tingkat individu, keluarga, kelompok-kelompok social ataupun komunitas guna mencapai kehidupan lebih baik.¹²

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) menurut Ginanjar Kartasasmita, pemberdayaan merupakan upaya sebagai usaha membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan serta berupaya untuk mengembangkannya.¹³ Sedangkan menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformative, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengann harapan.¹⁴

Dengan kata lain pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan sejumlah kegiatan guna memperkuat kekuasaan dan keberdayaan suatu kelompok yang lemah dalam sebuah masyarakat, salah satunya adalah individu-individu yang menderita masalah kemiskinan. Adapun sebagai tujuan, pemberdayaan lebih kepada keadaan sertahasilyangingin diwujudkan oleh suatu perubahan sosial. Pemberdayaan diartikan sebagai penyedia sumber daya, peluang dan pengetahuan serta keterampilan dalam hal meningkatkan

¹²FredianTonnyNasution,PengembanganMasyarakat,(Jakarta: YayasanPustakaOborIndonesia, 2019), Hlm.89.

¹³GinandjarKartasasmita,PembangunanUntukRakyat:MemadukanPertumbuhanDanPemerataan,(Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo,1996), hlm. 145.

¹⁴AzisMuslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Teras, 2019), hlm:3

suatu kemampuan warga miskin untuk kemudian menentukan nasibnya sendiri di masa yang akan datang. Berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Menurut Jim Ife pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakat.

Cara meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan khusus, melaksanakan program khusus. Dan banyak lagi program-program yang kita jalankan selama ini, agar rakyat kita makin kedepan makin berkemampuan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan program khusus yaitu:¹⁶

1. Program yang pertama adalah memberikan bantuan langsung kepada mereka yang tidak mampu, yang miskin. Misalnya beras untuk rakyat miskin, kemudian askeskin, BOS, subsidi untuk berbagai profesi petani dan lain-lain.
2. Program kedua adalah menyediakan lapangan kerja, yang bisa langsung mengurangi kemiskinan, itu bisa dikembangkan lebih baik lagi, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, termasuk koperasi.

Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Berkelanjutan ekonomi

¹⁵Zubaidi, pengembangan masyarakat, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 43.

¹⁶Zamzami, Memberdayakan ekonomi rakyat kecil, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 56-57.

dapat diartikan bahwa tidak adanya eksploitasi ekonomi oleh pelaku ekonomi yang kuat terhadap pelaku ekonomi yang lemah. Dalam hubungannya ini, maka dirasa perlu adanya sebuah kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung, dan memberikan jalan bagi para pelaku.¹⁷

Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan oleh United Nations meliputi:

1) Getting to know the local community.

Mengetahui karakteristik masyarakat lokal yang akan diberdayakan, termasuk pemberdayaan karakteristik yang memberdayakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2) Gathering knowledge about the local community.

Mengumpulan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status social ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta factor kepemimpinan yang baik formal maupun informal.

3) Identifying the local leaders.

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia jika tidak memperoleh hubungan dari pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, factor the local leaders harus selalu diperhatikan karena mereka memiliki pengaruh yang kuat

¹⁷Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Jakarta Selatan, Disebarkan Oleh, Pimpinan Ekonomi Universitas Brawijaya 2019), hal. 46

di dalam masyarakat.

4) Stimulating the community to realize that it has problems

Di dalam sebuah masyarakat yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan, sadartidaknya itu tidak akan merasakan bahwa mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan. Oleh sebab itu, masyarakat memerlukan sebuah pendekatan persuasive agar supaya mereka sadar bahwa mereka mempunyai masalah yang harus dipecahkan serta ada kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5) Helping people to identify their most pressing problems.

Masyarakat berfungsi memberikan sebuah rangsangan kepada masyarakat untuk membicarakan masalahnya dan merumuskan masalahnya dalam suasana kebersamaan. Upaya pemberdayaan, seperti dikatakan Kartasmita harus dilakukan tiga arah. Pertama menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap manusia telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan maka pemberdayaan mengupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya potensi-potensi yang dimiliki. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat artinya, langkah pemberdayaan di upayakan melalui aksi-aksinya, pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, lapangan kerja, pasar, dan prasarana lainnya. Ketiga, melindungi masyarakat hal ini berarti dalam memberdayakan masyarakat perlu di upayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang.

b. Ekonomi masyarakat

Dalam konteks permasalahan yang sederhana, ekonomi masyarakat

merupakan salah satu strategi didalam kehidupan bermasyarakat yang dikembangkan oleh penduduk miskin, baik dikota maupun di desa.¹⁸ Meningkatkan kesejahteraan ekonomi, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Ekonomi bisa di katakan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi dan distribusi serta konsumsi. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan kendala keterbatasan sumber daya, yang berkaitan dengan upaya, yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Produksi dan distribusi serta konsumsi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus serta biasanya disebut sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Proses ini berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang social dan ekonomi serta budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi) harus menikmati (konsumsi), dan sebaliknya yang menikmati harus yang menghasilkan. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya mengelolah sumber daya apapun itu yang dapat mereka kerjakan, dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan fundamental dan keluarga mereka.²⁰

¹⁸Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT, (Yogyakarta: Aditya Media, 2019), hlm

¹⁹Gunawan Sumodiningrat, "Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,)", hlm. 24.

²⁰Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 1.

C. BUMDes dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

1) Teori BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang diterapkan di deesa yang mana secara keseluruhan atau sebagian asetnya merupakan hak desa dnegan pelibatan yang dilakukan secara tatap muka atau langsung dimana bersumber pada aset desa yang dipisah-pisahkan untuk mengelola aset, bantuan fasilitas, serta bentuk bisnis lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang desa No 6 tahun 2014 dan peraturan menteri nomoe 4 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa disetiap desa bias dibentuk BUMDes yang mana pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai cara menampung semua aktivitas dalam bidang ekonomi maupun jasa umum yang dijalankan oleh desa yang bekerjasama dengan desa lainnya.

2) Bentuk Usaha BUMDes

- a. Serving, merupakan bentuk usaha milik desa yang fokusnya melaksanakan bisnis social dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat disebut jasa public yang ditujukan kepada semua warga.
- b. Banking, adalah bentuk usaha yang berpusat pada bidang financial yaitu dengan mencukupi keperluan keuangan warga desa.
- c. Renting, adalah bentuk usaha yang berpusat pada aspek penyewaan yaitu dengan membantu seluruh warga desa yang memerlukan persewana dalam upaya mencukupi kebutuhan hidupnya.
- d. Brokering, merupakan perantara yang dikatakan sebagai lembaga penengah yang menyambungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang mempunyai target yang

sama.

e. Trading, Merupakan salah satu bentuk usaha yang ada di BUMDes yang focus kegiatannya terhadap produk atau barang tertentu di sebuah pasar untuk memenuhi kebutuhan warga desa.

f. Hoking, merupakan komponen BUMDes di mana masing-masing bagian berdiri sendiri yang telah diatur dengan tata sinerginya oleh BUMDes agar maju dan meningkat bersama.

g. Contracting, adalah bisnis kemitraan yang dilakukan melalui unit usaha dalam BUMDes yang bekerjasama dengan pemerintah desa atau kelompok lainnya.

3) Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

a) Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan berlandaskan beberapa prinsip seperti kerja sama, berkontribusi, persamaan hak, terbuka, akuntabel, serta sustainable, dengan cara member-base dan selfhelp yang dilakukan secara profesional serta mandiri. Sehubungan dengan itu, untuk membangun sebuah BUMDes diperlukan suatu informasi yang benar dan tepat tentang suatu karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial dan budaya masyarakatnya serta peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang diperoleh.

b) BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas keinginan masyarakat yang menganut sebuah asas kemandirian, harus mengedepankan perolehan modalnya yang berasal dari masyarakat dan Pemerintah desa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat menghasilkan modal dari berbagai pihak luar semisal dari pemerintah kabupaten dan pihak lainnya, serta dapat juga melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. lebih

lanjut peraturan mengenai BUMDes itu akan diatur melalui Peraturan Daerah BUMDes didirikan dengan capaian yang jelas. Adapun capaiannya, akan direalisasikan dengan berbagai cara seperti memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha sifatnya produktif diutamakan untuk kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, melahirkan kesempatan yang merata dalam berusaha serta mendorong penghasilan masyarakat di desa. Di sisi lain BUMDes diharapkan mampu mendidik masyarakat untuk terbiasa menabung, hal tersebut diharapkan pula dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan kemandirian.

c) Pengelolaan BUMDes, dipatikan akan tetap melibatkan pihak ketiga yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Disebarluaskan oleh masyarakat desa sendiri, tetapi diharapkan dapat juga melibatkan masyarakat dalam skala yang lebih luas (kabupaten). Oleh karena itu, pendirian BUMDes yang diinginkan oleh masyarakat tetap harus mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang sifatnya mendukung, pembayaran pajak di desa, serta kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajiban mereka sendiri.

Diketahui bahwa karakteristik masyarakat di desa yang mendapat pelayanan utama BUMDes yaitu:

1. Masyarakat desa yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang dan pangan serta papan, sebagian besar mempunyai sumber penghasilan di sektor pertanian serta kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang sifatnya usaha informal.
2. Masyarakat desa yang pendapatannya terbilang sangat rendah, dan sulit menyisihkan Sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha

selanjutnya.

3. Masyarakat desa yang dalam hal ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak yang lari ketangan para pengusaha yang mempunyai modal lebih besar.

4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya selalu dipersulit oleh berbagai sistem pemasaran yang memberikan peluang kepada para pemilik modal agar bisa menekan harga dipasar, akibatnya mereka akan memeras serta menikmati berbagai hasil keringat masyarakat di desa.

Atas dasar pengetahuan tersebut, maka karakter BUMDes itu sama persis dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, cara dan sistem pengelolaanya.

Secara garis besar pendirian BUMDes difungsikan untuk:

- a. Mendorong pelayanan terhadap masyarakat (standar pelayanan minimal), agar usaha masyarakat di desa dapat berkembang.
- b. Memberdayakan desa sebagai sebuah wilayah yang otonominya berkaitan dengan usaha-usaha yang sifatnya produktif bagi upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan asli desa atau biasa disebut sebagai PAD Desa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kemampuan desa serta masyarakat dalam memperkuat prekonomian di desa.

4) Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting untuk kemudian ditekuni atau dicermati agar dipahami serta dijabarkan dengan cara yang tidak jauh beda oleh PemDes, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan

juga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari BUMDes maka tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang harus dijadikan acuan dalam system pengelolaannya. Ada 6 (enam) prinsip yang harus jadi perhatian dalam mengelola BUMDes yaitu:

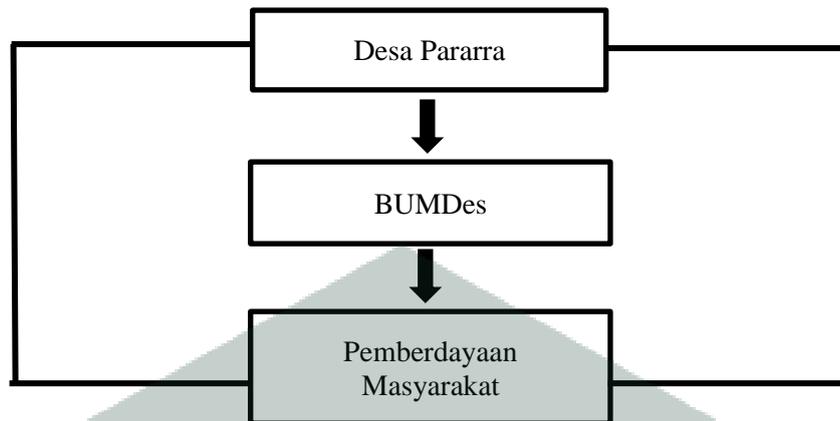
- a. Kooperatif, merupakan Semua elemen yang terlibat didalam BUMDes itu harus bisa melakukan sebuah kerjasama yang maksimal demi pengembangan serta keberlangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif. Yaitu Semua elemen yang ada didalam serta terlibat langsung dengan BUMDes itu harus secara sukarela dan diminta memberikan dorongan dan partisipasi yang dapat membantu kemajuan usaha BUMDes itu sendiri.
- c. Emansipatif. Semua komponen yang ikut berkontribusi di dalam BUMDes itu harus diperlakukan secara merata tanpa melihat golongan dan suku serta agama.
- d. Transparan. Suatu kegiatan yang memberikan pengaruh terhadap kepentingan masyarakat banyak harus bisa diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat secara mudah serta terbuka.
- e. Akuntabel. Semua aktivitas usaha harus mampu dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.
- f. Sustainabel. Aktivitas usaha harus dapat ditingkatkan dan dihidupkan oleh masyarakat dalam cakupan BUMDes. Terkait dengan perealisasiannya, Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes di harapkan bisa lebih berdaya. Hal tersebut karna adanya dorongan yaitu dana anggaran desa yang semakin membengkak. Sehingga mengakibatkan ketersediaan modal yang memadai untuk pendirian BUMDes.

Kalau hal ini bisa berjalan dengan baik, maka akan mengakibatkan peningkatan PAD Desa dan selanjutnya bisa digunakan untuk aktivitas pembangunan di desa. Sebuah hal yang perlu menjadi perhatian dan sangat penting dalam upaya meningkatkan ekonomi desa yakni memperkuat Kerjasama (kooperatif), menegedepankan kebersamaan dan menjalin kerekatan diseluruh elemen masyarakat desa. Diharapkan bisa menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengurangann kemiskinan dan pengangguran serta membuka jalan pasar.²¹

D. Kerangka Pikir

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di lakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju arah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat di tujukan agar mampu meningkatkan kualitas setiap masyarakat dalam segi kemampuan dan mampu melihat berbagai potensi yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat yang telah di lakukan oleh pemerintah beberapa tahun belakangan telah menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus lebih terarah kepada tujuannya. Sehingga di butuhkan suatu upaya dalam pemberdayaan masyarakat yang secara efektif mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu upaya dalam bentuk upaya pemberdayaan masyarakat itu adalah dengan menghadirkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi di wilayah pedesaan.

²¹BukuPanduanPendirianDanPengelolaanBadanUsahaMilikDesa(BUMDes),DepertemenPendidikanNasionalPusatKajianDinamikaSisemPembangunan(PKDSP),(Jakartaselatan,DisebarkanOleh,PimpinanEkonomiUniversitasBrawijaya2007),hal.11-12



Gambar 2.1 Skema Kerangka pikir

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa di Desa Pararra terdapat program BUMDes, dimana program yang dijalankan terdiri dari simpan pinjam, pengelolaan hasil alam dan pemberdayaan wisata. BUMDes tersebut didirikan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa Pararra. Dari program BUMDes yang dijalankan tersebut akan diteliti bagaimana pengelolaan BUMDes dan seberapa efektif program BUMDes tersebut dalam memberdayakan masyarakat.

BAB III

JENIS PENELITIAN

1) Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah berupa pendeskripsian masalah melalui kata-kata atau ucapan dari objek yang diamati. Suatu metode atau penelitian yang di ajukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau, intinya adalah penelitian ini mendeskripsikan fenomena apa adanya yang di peroleh dari hasil pengumpulan data dari data kualitatif melalui pengumpulan data baik dari data lapangan maupun dari data kepustakaan.

Metode penelitian salah satu factor penting yang menentukan keberhasilan penelitian, karena merupakan pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data yang sangat di butuhkan dalam sebuah penelitian. Secara sederhana, metode dan instrument penelitian berkaitan dengan cara bagaimana bagaimana mendapatkan data yang di butuhkan. Metode ini lebih menekankan kepada strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi, ruang waktu dari data yang di perlukan. Oleh karena itu hakekat metode penelitian adalah bagaimana secara berurut penelitian dilakukn, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian di lakukan.

2) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Parara Kecamatan Sabbang Kabupaten Kabupaten Luwu Utara. Lokasi ini di pilih peneliti karna

peneliti merasa perlu dilakukan penelitian dan juga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian karena lokasi tersebut terjangkau.

3) Defenisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan mengenai pembahasan penulis maka penulis memberikan pengertian dari setiap rangkaian judul yang ada seperti berikut ini:

a) Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki dua kata kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan dapat diartikan bukan hanya terkait kekuasaan politik dalam arti sempit, tetapi juga kekuasaan atau penguasaan klien atas pilihan-pilihan pribadi dan kesempatan-kesempatan untuk hidup serta kemampuan dalam menghasilkan sebuah keputusan terkait gaya hidup dan tempat tinggal, pekerjaan, pendefinisian kebutuhan, kemampuan meningkatkan kebutuhan sejalan dengan aspirasi atau keinginannya, ide atau gagasan, kemampuan memperlihatkan dan memberikan gagasan dalam sebuah forum diskusi secara terbuka tanpa tekanan, lembaga-lembaga, kemampuan untuk menjangkau dan menggunakan serta mempengaruhi intuisi masyarakat semisal lembaga kesejahteraan di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, sumber-sumber kemampuan mempengaruhi sumber-sumber formal dan informal serta kemasyarakatan, kegiatan ekonomi, kemampuan mempergunakan dan mengelola tata cara produksi dan distribusi serta pertukaran barang dan jasa.

Pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah cara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang mencakup serangkaian nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yaitu bersifat berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan. Cara ini bisa lebih luas dari

tadinya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan cara untuk mencegah peningkatan kemiskinan yang lebih lanjut. Dinyatakan pula bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diklarifikasikan dengan beberapa penyebab seperti self-reliant, selfconfident, dan selfrespecting, diharapkan bisa menghayati nilai-nilai yang sebelumnya kedalam kelompok. Adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam rangka menegembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

b) Masyarakat Desa

Masyarakat adalah totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan saling mengembangkan suatu kebudayaan sendiri. Dapat dikatakan pula sebagai indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan oranglain dan tak akan mungkin dilepaskan dari nilai-nilai, norma norma, tradisi, kepentingan-kepentingan, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya.

c) Pemberdayaan Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin sehingga mereka mampu keluar dari jeratan kemiskinan dan keterblekangan.

d) BUMDes

Badan usaha milik desa (BUMDes) Adalah suatu badan usaha yang di Kelola disebuah desa dengan menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan cara struktur dan termanagement.

4) Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data ini diperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan yaitu dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara kepada subjek penelitian dan informan penelitian di lokasi penelitian yaitu di desa pararra. Informan penelitian dalam hal ini yaitu masyarakat desa pararra.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa kepustakaan dimana mulai dari hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya yang mengenai studi kepustakaan. Dimana sumber-sumbernya berasal dari jurnal, artikel, buku, yang membahas tentang peran BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat.

5) Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan media atau sarana yang dipakai oleh peneliti guna memperoleh data dari informan penelitian. Dalam penelitian ini, selain dari peneliti sebagai instrumen penelitian yang utama, terdapat juga instrumen penelitian yang lainnya yang digunakan, yaitu pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan alat rekam (handphone), guna mendukung proses dalam menyusun informasi yang didapatkan selama penelitian.

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan field Research. Jenis penelitian ini adalah metode pengumpulan data

yang dilakukan secara langsung dilapangan (objek penelitian). Pada Teknik ini digunakan beberapa instrument yaitu:

1) Observasi

Observasi yang dilakukan adalah pengamatan yang dilakukan sebelum penelitian mengetahui aspek-aspek apa dari objek yang diteliti yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, dalam hal ini terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja akan diamati. Alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu peneliti ingin turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana peran program BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat.

2) Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pernyataannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah masyarakat desa yang merasakan dampak dari diadakannya program BUMDes beserta dengan aparat desa di Desa Pararra.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengambil data-data yang ada pada objek penelitian kemudian mengambil data yang relevan.

7) Pemeriksaan keabsahan data

Dalam pengujian keabsahan data, pengujian data dalam penelitian kualitatif terdiri atas beberapa pengujian, yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan proses peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan hubungan antara peneliti dan narasumber akan terbentuk (rapport), akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang asli. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh

b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melaksanakan pengamatan secara lebih cermat dan berkelanjutan agar kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c) Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu

d) Analisis kasus negatif

Kasus negative adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Kasus negative merupakan upaya mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan

2. Pengujian transferability

Merupakan validitas eksternal dimana peneliti membuat hasil penelitian secara jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3. Pengujian Depenability

Dalam penelitian kualitatif uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji dependability digunakan untuk menentukan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ada dan data yang diperoleh berasal dari informan yang terkait.

4. Pengujian Konfirmability

Pengujian konfirmability mirip dengan pengujian dependability yaitu menguji hasil penelitian dan mengkaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability

8) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Apabila peneliti merasa bahwa jawaban narasumber belum memuaskan, maka penelitian kan melanjutkan pertanyaannya hingga tahap tertentu, hingga data yang diperoleh sudah dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari.

a. Data Reduction (reduksi data)

Banyaknya jumlah data yang di peroleh selama peneliti melakukan penelitian dilapangan membuat data yang diperoleh akan menjadi rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Penyajian data kualitatif ditulis dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan agar dapat menggabungkan informasi yang tersusun secara padu agar lebih mudah untuk dipahami.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

c. Verifikasi Data

Proses akhir dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah dengan memverifikasi data yang didapatkan selama penelitian. Dimana verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti masih bersifat sementara, dan akan muncul perubahan-perubahan apabila kesimpulan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk membantu dalam proses pengumpulan data berikutnya. Namun, bilamana dalam penyusunan kesimpulan diawal disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka simpulan tersebut dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan yang dapat dipercaya.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

a. Profil dan Sejarah Desa Pararra

Pararra adalah salah satu Desa yang tertua di kecamatan Sabbang. keberadaan Desa Pararra diperkirakan sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. setelah terjadi pergolakan perjuangan pemuda dan perjuangan rakyat Luwu melawan tantara (NICA) yang ingin Kembali menjajah Indonesia tahun 1948-1949. Dan kemudian pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar 1953-1965, awal perubahan system pemerintahan dari Tomokaka menjadi Kepala Desa.

Secara resmi terbentuknya pemerintahan Desa Pararra dimulai pada tahun 1965 sampai sekarang. Dari tahun ke tahun sejarah kepemimpinan kepala Desa di Pararra yaitu:

- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Kepala Desa I | : Abu Dg. Mawakka | Tahun 1945-1965 |
| 2. Kepala Desa II | : Tema To Mihara | Tahun 1965-1982 |
| 3. Kepala Desa III | : Mangun Pakan | Tahun 1982-1993 |
| 4. Kepala Desa IV | : Bachrun Zaur. S | Tahun 1993-1994 |
| 5. Kepala Desa V | : Idrus To Pacawang | Tahun 1994-2000 |
| 6. Kepala Desa VI | : Basri Abdillah | Tahun 2001-2014 |
| 7. Kepala Desa VII | : Nirwan L | Tahun 2014-2021 |
| 8. Kepala Desa VIII | : Nirwan L | Tahun 2021-2027 |

Sebelumnya pada tahun 1953 Desa Pararra dimekarkan menjadi dua Desa

yaitu Desa Pararra dipimpin Oleh Abu Dg. Mawakka dan Desa Tandung dipimpin Oleh Maddiaja To Kurniati. Selanjutnya pada tahun 1994 dimekarkan lagi menjadi dua Desa yaitu Desa Pararra dan Desa Tulak Tallu.

Peristiwa yang terjadi dalam sejarah Desa Pararra dan Desa Tulak Tallu yaitu:

1. Pada Tahun 1965-1980, masyarakat merasakan kedamaian di dalam kampung, karena pemerintahan berjalan berbarengan dengan Lembaga adat.
2. Pada Tahun 1984, masyarakat mendapatkan hasil yang memuaskan yakni zaman lappoose.
3. Pada Tahun 1986, terjadi banjir melanda Desa Pararra yang menenggelamkan rumah penduduk.
4. Pada Tahun 1989, masyarakat merasakan panen kakao yang memuaskan
5. Pada Tahun 1984, Desa Pararra dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Pararra dan Desa Tulak Tallu
6. Pada Tahun 1998, terjadi banjir yang menghanyutkan rumah penduduk dan menyapu pemukiman serta memutuskan akses transportasi darat penghubung Desa Pararra menjadi ibukota kecamatan dan memutuskan akses jalur lecamatan sabbang dan kecamatan limbong.

Berdasarkan letak geografis wilayah Desa Pararra berada diantara 2°37'13" S-120°09'06" E, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Malimbu
- Sebelah timur : Desa Tulak Tallu
- Sebelah selatan : Desa Buangin/Kalotok
- Sebelah barat : Desa Tandung

Secara Topografu, Desa Pararra merupakan Desa yang ada di daratan yang terdiri dari:

- Sawah : 20 Ha
- Tanah bukan sawah :000
- Pekarangan /Pemukiman :/188 Ha
- Tegal/Kebun : 30,25 Ha
- Fasilitas Sosial dan ekonomi : 3,50 Ha

Secara administratif wilayah Desa Pararra terdiri dari 5 (lima) RT, meliputi 5 (lima) dusun (peta desa terlampir), yaitu:

1. Dusun Pararra
2. Dusun Sangkale
3. Dusun Rante Takoa
4. Dusun Lena
5. Dusun Saluturunan

Untuk mengukur tingkat perkembangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang indeks Desa membangun. Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa Meliputi:

- a. Cepat berkembang
- b. Berkembang
- c. Kurang berkembang

Sedangkan berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016, tingkat

perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa sangat Tertinggal

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		Keterangan
	Permandagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendes Nomor 2 Tahun 2016	
2019	Kurang Berkembang	Desa Sangat Tertinggal	
2020	Kurang Berkembang	Desa Tertinggal	
2021	Berkembang	Desa Berkembang	

Sumber Data: Data IDM

2. Demografi (kependudukan)

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 1050 jiwa tahun 2018 meningkat menjadi 1142 ditahun 2019 dan pada tahun 2020 naik menjadi 1263 dan pada akhir tahun 2021 penduduk Pararra berjumlah 1305 jiwa.

Adapun rincian penduduk berjenis secara rinci dapat dilihat dari pada table 1 dibawah ini:

Tabel 1**Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jumlah penduduk jiwa			
	Jenis kelamin	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Laki-laki	623	678	682
2.	Perempuan	519	585	623
Jumlah		1142	1263	1305
		Naik/turun % dari tahun sebelumnya	Naik/turun 3% dari tahun sebelumnya	Naik/turun 4% dari tahun sebelumnya

Sumber : Profil Desa

Seperti terlihat dari tabel diatas, menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang secara detail dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2**Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2021**

No	Kelompok Usia	L	P	Jumlah	Persentase (%)
1.	0-5	63	55	118	9,04 %
2.	6-12	66	61	127	9,7 %
3.	13-17	57	31	89	6,8 %
4.	18-21	46	46	92	7,1 %
5.	22-30	116	72	188	14,4 %

6.	31-45	168	125	293	22,5 %
7.	46-55	70	64	134	10,3 %
10.	>56	96	268	364	27,9 %
Jumlah		682	623	1305	100%

Sumber: Profil Desa

Dari total jumlah penduduk Desa Pararra, yang dapat di kategorikan ke kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia >56 tahun, jumlahnya mencapai 27,9%. Usia 0 - 5 tahun ada 0.04%, sedangkan usia 5 - 18 tahun, ada 25%. Sementara usia 18 - 60 tahun ada 55% yang dikategorikan sebagai usia produktif.

3. Keadaan Sosial

a. Sumber daya manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Sejak kandungan hingga akhir hayat . Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Pararra cukup baik di bandingkan pada masa - masa sebelumnya.

Table 3
Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Pekerjaan

No	Usia	Jenis kelamin		Pekerjaan									jumlah
		L	P	Peta ni	Bu ru h	Pe da gang	ASN	pe ng usa ha	Pek erja infir mal	Lain -lain	Pe ng an gg ur an	RT M	
1.	17-25	78	24	38	4	4	5	6	2	10	48	65	%
2.	25-35	84	42	30	21	7	6	7	5	13	54	88	%
3.	35-50	88	42	32	29	6	5	9	2	12	35	90	%
4.	50-60	127	78	89	54	22	4	5	2	14	15	78	%
5.	60 Tahun	96	59	44	32	30	0	2	0	15	32	85	%
	JML	718		718									100 %

Sumber data: Desa Pararra tahun 2021

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka di harapkan mampu jadi pendorong perekonomian masyarakat dengan ketersediaan Sumber daya Manusia yang mampu mengelola potensi yang ada di Desa Pararra. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pararra dapat di lihat dari tabel di bawah ini.

No	Keterangan	Jumlah Penduduk		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Tidak Tamat Sekolah SD	165	168	170
2.	Tamat Sekolah SD	32	29	33
3.	Tamat Sekolah SLTP	33	32	61
4.	Tamat SMU	44	35	46
5.	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	0	0	0
6.	Tamat Starata I	32	22	40
7.	Tamat Starata II	0	0	0
Jumlah		247	286	350

Sumber : Profil Desa

Table 5
Angka Putus Sekolah

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
2019	7	1	22
2020	8	1	25
2021	5	1	35
Jumlah	20	3	82

Tahun
n 2019-
2021

Sumber : Profil Desa

Dari tersebut menunjukkan bahwa angka putus cukup menurun sepanjang tiga tahun terakhir sehingga perlu dilakukan langkah langkah strategi dalam mempertahankan ini.

Tabel 6**Jumlah Sekolah dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1.	Pendidikan anak usia dini:	1	23
2.	TK:	0	0
3.	Sekolah Dasar :	2	164
4.	SMP/MTs:	0	0
5.	SMU/SMK/MA:	0	0

c. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Pararra antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia Harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi.

Tabel 7. Perkembangan Kondisi Kesehatan tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kematian Bayi	-	-	-	-
2.	Angka Kematian Ibu	-	-	-	-
3.	Balita dengan Gizi Buruk				
4.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil				

Sumber data : Profil Desa Pararra 2020

4. Letak Geografis

a. Monografi

Monografi Desa Pararra terletak kurang lebi Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Malimbu

Sebelah Timur : Desa Tulak Tallu

Sebelah Selatan : Desa Buangin/Kalotok

Sebelah Barat : Desa Tandung

b. Demografi

Desa Pararra adalah Daerah yang terdiri dari sebagian besar Pertanian Sawah 1, 782 Ha, 470 Ha Perkebunan Rakyat dan selebihnya adalah Pemukiman Masyarakat. Kekayaan alam Desa Pararra berasal dari hasil tani dan kebun : Kakao, Padi, Jagung, dan Tanaman Holtikultura lainnya dengan curah hujan cukup.

c. Kondisi Ekonomi

Jumlah Penduduk desa KK dengan mata pencaharian umumnya petani sawah dan perkebunan kakao, jagung dan tanaman lainnya dengan hujan cukup. Jumlah STTS Lembar dengan target pokok PBB, Tahun 2017 sebesar Rp. 30.142.866

b. Visi Misi Desa Pararra

Visi Dan Misi

1) Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan

citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Pararra adalah:

"Bersama Melanjutkan Pembangunan Menuju Desa Pararra yang Lebih Baik"

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Pararra dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa dan pemberdayaan desa secara terpadu berlandaskan kearifan lokal.

2) Misi

Dalam meraih Visi Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal Maka disusunlah Misi Desa Pararra, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan Aparat Desa yang Professional, berkualitas, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dengan semangat gotong royong untuk pencapaian kualitas pembangunan yang lebih baik dan merata.
3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan mensukseskan program penanganan pandemi Covid-19, penanganan stunting, sanitasi lingkungan serta melanjutkan Program Bedah Rumah/ Rehab rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
4. Meningkatkan mutu pendidikan, keagamaan, organisasi kepemudaan, kantibmas

dan sosial budaya berbasis kearifan lokal.

5. Mewujudkan sistem Usaha Mandiri melalui Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada UMKM, Karang Taruna, KWT dan Pariwisata.

e) Gambaran Umum BUMDes TA DUNG MAUPA” Desa pararra

a. Organisasi

Dalam rangka upaya pemberdayaan perekonomian desa yaitu meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan untuk desa dan pendapatan masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah desa pararra membuat peraturan desa No. 21 tahun 2015 tentang pendirian Badan usaha milik Desa, tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengelola BUMDes dan menjalankan usaha dan membuat laporan kemajuan dan perkembangan sebai tanggung jawab kepada badan pengawas dan pemerintah Desa Pararra.

b. Tujuan pembentukan BUMDes Ta’ Dung Maupa

Pembentukan BUMDes merupakan suatu usaha dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan pendapatan asli Desa (PAD). Tujuan pembentukan BUMDes Ta’ Dung Maupa adalah sebagai berikut;

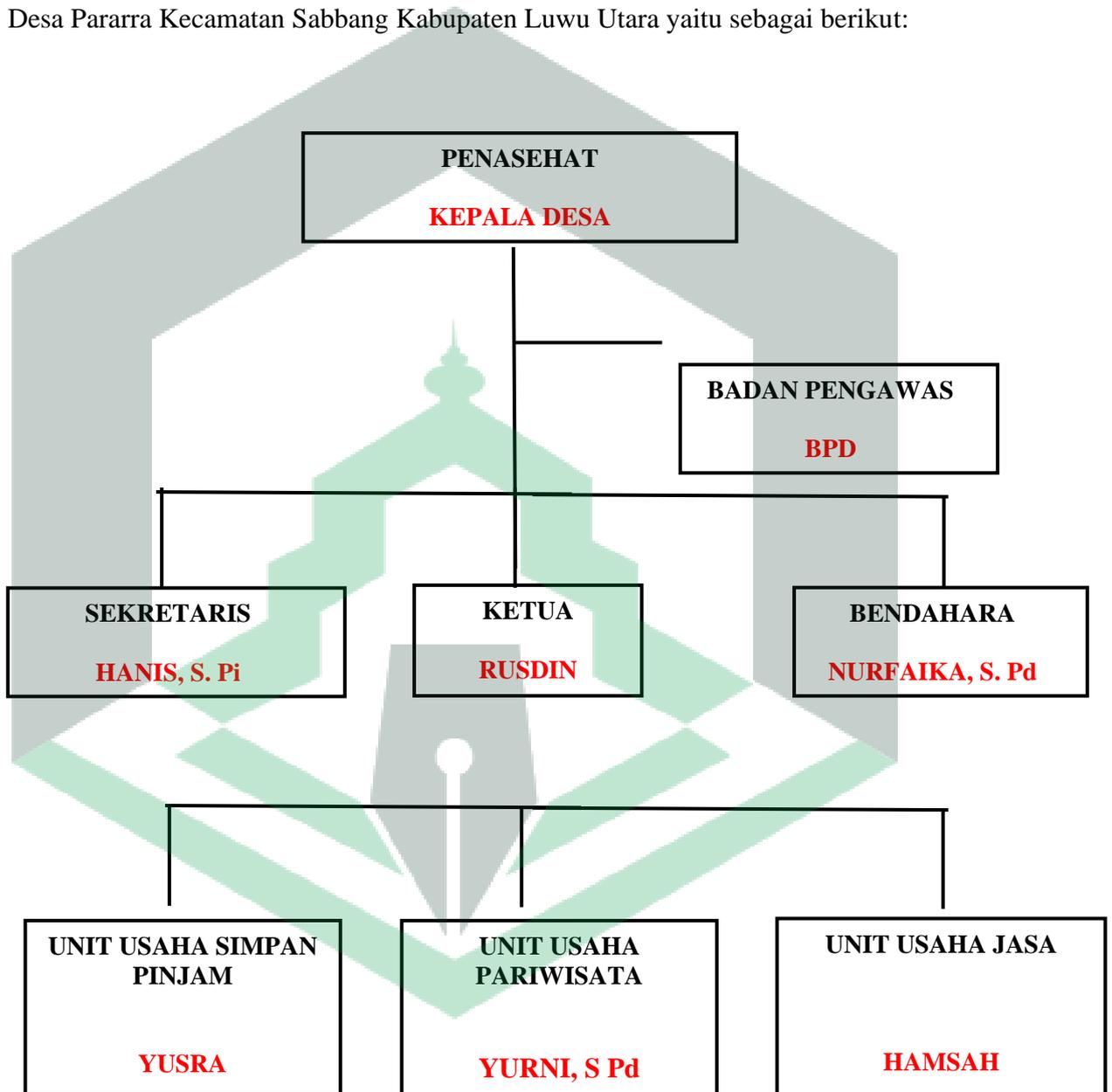
1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha produktif berwira usaha anggota masyarakat desa yang berpenghasiln rendah.
3. Meningkatkan pendapatan asli desa.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

f) Struktur Organisasi BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Ta Dung Maupa"

Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:



a. Unit Kegiatan Usaha BUMDes TA DUNG MAUPA Desa Pararra

Pemerintah Desa Pararra mendirikan BUMDes sebagai upaya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan sebagai lembaga ekonomi untuk menghasilkan pendapatan untuk desa. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa.

BUMDes Ta' Dung Maupa berdiri pada tanggal 29-07-2016. dengan SK Kepala Desa tentang pembentukan BUMDes dengan yang anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangga berdasarkan kepada peraturan perundang- undangan. Pembentukan BUMDes untuk mengelola potensi desa dan sebagai langkah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Berikut ini adalah unit usaha yang di jalankan oleh BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra :

1. Program Simpan Pinjam

Unit usaha ini mulai dijalankan sejak awal terbentuknya BUMDes Ta' Dung Maupa pada tahun 2016 yang dikelola langsung oleh pengurus BUMDes Ta' Dung Maupa. Sumber dana untuk unit usaha simpan pinjam berasal dari bantuan permodalan dari APBD dan APBDes dengan jumlah kekayaan atau aset pertama sebesar Rp.40.000.000,-. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha ataupun untuk masyarakat yang membutuhkan biaya tertentu seperti membayar utang dan lain-lain.

“Program simpan pinjam diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan uang atau modal dalam menjalankan usaha dan keperluan lainnya, dengan persentase bunga sebesar 3% kepada setiap masyarakat yang melakukan atau mengambil pinjaman di BUMDes.”²²

²² Rusdin, Ketua BUMDes. “Wawancara” 22 September 2022.

Berikut adalah nama peminjam di unit usaha simpan pinjam:

No	Nama	Jumlah
1.	Hasmia	Rp. 1.660.000,-
2.	Rika	Rp. 1.940.000,-
3.	Nurul Hafizah	Rp. 3.000.000,-
4.	Juminar	Rp. 500.000,-
5.	Emiwati	Rp. 300.000,-
6.	Nani	Rp. 500.000,-
8.	Hasriana	Rp. 200.000,-
9.	Suartini	Rp. 480.000,-
10.	Salma	Rp. 1.000.000,-
11.	Minarti	Rp. 1.300.000,-
12.	Rahmawati	Rp. 1.000.000,-
13.	Dian	Rp. 1.400.000,-
14.	Sulma	Rp. 1.000.000,-
15.	Erni	Rp. 1.000.000,-
16.	Irda	Rp. 300.000,-
17.	Nova	Rp. 1.000.000,-
18.	Masria	Rp. 3.000.000,-
19.	Endang	Rp. 2.000.000,-
20.	Sukma	Rp. 5.000.000,-
Total		26.580.000,-

Menurut beberapa masyarakat yang telah di wawancari oleh peneliti, unit usaha simpan pinjam ini memiliki potensi untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pararra, akan tetapi dari segi modal yang disediakan oleh pihak pemerintah masih terbilang minim, sehingga Sebagian masyarakat tidak dapat meminjam.

Salah satu masyarakat yang telah diwawancari adalah ibu Ita yang menyatakan bahwa:

“menurut saya usaha simpan pinjam ini sebenarnya sangat bagus tapi masih banyak orang yang mengeluh karna pengelola BUMDes hanya menyediakan sedikit dana.”²³

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa unit usaha simpan pinjam ini masih belum bisa dikatakan efektif, karena minimnya dana yang disediakan pihak BUMDes.

Sedangkan masyarakat lainnya menyatakan bahwa:

“usaha simpan pinjam ini memiliki tingkat Bunga yang sangat tinggi sehingga sebagian masyarakat mengeluh terkait hal tersebut.”²⁴

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bunga yang ditetapkan oleh pihak pengelola BUMDes relatif tinggi sehingga masyarakat khususnya ekonomi kebawah mengalami kesulitan dalam transaksi simpan pinjam tersebut.

Senada dengan itu bapak Naim BA selaku ketua BPD sekaligus pengawas BUMDes Desa Pararra menyatakan bahwa:

“pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan atas keputusan bersama. Sasarannya pun tertuju kepada masyarakat seperti meningkatkan usaha masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa”²⁵

²³ Ita, Masyarakat. “Wawancara”. 23 September 2022.

²⁴ Sri, Masyarakat. “Wawancara”. 23 September 2022.

2. Token Listrik

Pembayaran tagihan listrik merupakan layanan utama yang menopang kehidupan rumah tangga sehari-hari dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya jasa ini memudahkan masyarakat untuk membayar tagihan listrik sehingga dapat terus menikmati layanan listrik dari PLN karena tidak terlambat membayarnya.

Pemanfaatan token listrik dikategorikan sedang, karena unit usaha tersebut hanya di gunakan masyarakat sebanyak 130 Rumah tangga dari 305 KK yang setara dengan 42,6% jangka waktu pembayaran selama satu bulan.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat diantaranya sebagai berikut:

Ibu Fatmah selaku ibu rumah tangga mengatakan bahwa:

”token listrik ini sangat membantu jika kami belum mempunyai dana untuk membayar tagihan listrik “. ²⁶

Berdasarkan Pengamatan peneliti dilapangan mengenai unit usaha token listrik tersebut, memang sangat memudahkan masyarakat khususnya bagi yang tidak membayar tepat waktu tagihan listrik dengan beban yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.500.00,. per rumah tangga.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, jenis usaha tersebut masuk dalam kategori Serving, yang fokus melaksanakan bisnis sosial dengan member pelayanan untuk masyarakat dapat disebut jasa publik yang ditujukan kepada semua warga.

²⁵ Naim BA, Pengawas BUMDes. “Wawancara” 22 September 2022

²⁶ Fatmah, Masyarakat. “Wawancara” 22 September 2022

“token listrik ini saya rasa sangat percuma diterapkan oleh pihak BUMDes karena masih banyak masyarakat yang tidak kebagian khususnya saya sendiri, jadi saya sangat kecewa dengan hal itu.”²⁷

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa token listrik ini belum mampu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Karena program kerja ini dinilai tidak berjalan dengan maksimal.

“program kerja untuk token listrik ini sangat bagus karena mampu membantu masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah dengan alasan memberikan jangka waktu kurang lebih sebulan untu membayar tagihan listrik.”²⁸

3. Penyewaan Kursi

Tujuan usaha penyewaan BUMDes yaitu memberikan pelayanan kepentingan warga sekaligus mendapatkan pendapatan untuk desa. Adapun barang disewakan oleh BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra adalah Kursi. Dengan adanya bentuk usaha tersebut masyarakat akan lebih mudah melakukan penyewaan jika mengadakan acara-acara meriah dengan tarif yang murah dan digratiskan bagi masyarakat yang sedang berduka. Adapun proses peminjaman dari kursi oleh masyarakat yaitu dengan melakukan pembayaran di akhir pemakaian. penggunaan Jasa Penyewaan kursi sebanyak 104 orang dari 305 KK. Yang setara dengan 45,9%

Adapun wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris BUMDes yang mengatakan bahwa:

“pemakaian kursi yaitu di gunakan masyarakat apabila ada acara pernikahan atau acara meriah lainnya dengan biaya sewa yang murah (biaya sewa ini

²⁷ Ila, Masyarakat. “Wawancara” 22 September 2022.

²⁸ Nurfaika. Bendahara BUMDes. “Wawancara” 22 September 2022.

digunakan untuk kerusakan tenda dan kursi) dan tidak ada pungutan biaya bagi masyarakat yang berduka (kematian).”²⁹

Hal wawancara tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat atas nama ibu Yuniarti yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bentuk usaha BUMDes yaitu penyewaan kursi kami tidak repot-repot lagi mencari kursi jika ada acara, karena dengan adanya bentuk usaha tersebut kami lebih muda melakukan penyewaan”

“Adanya program ini bisa dikatakan belum berdampak maksimal terhadap Masyarakat karena tidak semua masyarakat bisa memanfaatkannya, dengan alasan tidak semua orang punya kegiatan”³¹

Melalui unit usaha tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan penyewaan dengan biaya tarif yang lebih murah yaitu Rp 1000/buah. Sejalan dengan hasil wawancara diatas, jenis usaha tersebut masuk dalam kategori Usaha Renting, yang berpusat pada aspek penyewaan yang diperlukan warga desa.

B. Pembahasan

1. System Pengelolaan BUMDes di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan, sebab strategi memberikan arah, tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang dapat memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki

²⁹ Hanis, Sekretaris BUMDes. “Wawancara” 22 September 2022.

lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desanya. Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa lewat pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, BUMDes juga memberikan efek atas meningkatnya pendapatan asli desa (PAD) yang mampu memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan serta untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antardesa. Kehadiran BUMDes juga mampu memberikan sumbangsi dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat dan pemberdayaan potensi ini juga memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra dikelola oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ta' Dung Maupa Desa Pararra melakukan pengelolaan yang berdasar dengan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga mencapai hasil yang ingin dicapai dalam mengelola BUMDes Desa pararra Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Sebelum dibentuk pengurus kita mengadakan sosialisasi pembelajaran BUMDes dulu setelah itu baru mencari calon pengelola yang bias mengurus BUMDes kemudian kita musyawarahkan. Selanjutnya pengelola BUMDes dapat merencanakan rencana kerjanya kedepan agar saling menguntungkan untuk untuk desa serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan.”³⁰

³⁰ Nirwan L, Kepala Desa. “Wawancara”. 22 September 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Desa Pararra penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dalam mengatur strategi pengelolaan BUMDes terlebih dahulu melakukan sosialisai pembelajaran BUMDes setelah itu dapat dimusyawarahkan terkait rencana-rencana kerja yang akan dilakukan pengelola dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Pararra . Bagaimana dengan mendiskusikan teori Marrus (2002:31) bahwa strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Wawancara dengan ketua pengelola BUMDes yang mengatakan bahwa :

“BUMDes di Desa Pararra sistem pengelolaannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan peluang usaha, intinya bahwa semua bentuk usaha itu bisa menghasilkan. Salah satunya yang sudah berjalan adalah simpan pinjam”.³¹

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pararra yaitu bagaimana pemerintah desa dan pengelola bisa menciptakan peluang usaha untuk dikelola dan semua bentuk usaha bisa menghasilkan. Oleh karena itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Maccini Baji.

Wawancara dengan Bendahara BUMDes Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

³¹ Naim Ba, Ketua BPD. “Wawancara”. 22 September 2022.

“Badan Usaha Milik Desa secara pengelolaan memiliki aturan yang diterapkan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah. Adapun strategi dan pengelolaan yang jelas untuk bisa mendapatkan persoalan dana di BUMDes itu dipengaruhi dari sisi pekerjaan masyarakat dan memiliki UKM yang aktif”.³²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diterapkan pada Peraturan Desa dan Peraturan Daerah, dan untuk masyarakat Desa Pararra yang ingin membantu pengelolaan dapat dilihat dari sisi pekerjaan dan memiliki UKM yang aktif sampai sekarang ini. Seperti halnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2015 tentang cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa lewat pengembangan penghasilan serta memberikan partisipasi ekonomis untuk pemerintah desa. Kemudian Mirnawati (2018) menjelaskan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing desa yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Kemudian ditambahkan oleh divisi Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Tentunya dalam hal ini BUMDes di naungi oleh Pemerintah Desa, jadi strategi yang dilakukan BUMDes ini tentu harus ada kerjasama dengan

³² Nurfaika. Bendahara BUMDes. “Wawancara”. 23 September 2022.

masyarakat yang ada di Desa tersebut, tentunya dalam hal ini kami selaku pengurus mengupayakan mengoptimalkan upaya untuk memproduktifkan dana BUMDes yang ada di Desa ini walaupun secara Bertahap”.³³

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dan system dalam mengelola BUMDes di Desa Pararra tentu telah di naungi oleh pemerintah Desa dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memproduktifkan dana BUMDes yang ada di Desa Pararra. Dalam mengukur suatu keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha (BUMdes) dapat di analisis berdasarkan indicator fungsi manajemen strategi dalam buku (Rachmat, 2014) yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pengevaluasian (*evaluating*).

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra, perencanaan merupakan kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki dan membutuhkan suatu aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode apa yang akan digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana BUMDes Ta Dung Maupa Desa Pararra menetapkan tujuan yang ingin

³³ Yusra, Divisi Unit Usaha Simpan Pinjam. “Wawancara”. 23 September 2022.

dicapai. Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Pararra perlu diadakan musyawarah untuk merencanakan perencanaan yang tepat dalam mengelola badan usaha milik desa. Selanjutnya pengelolaannya direncanakan oleh pengelola sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD/ART ini merupakan hasil musyawarah pengelola dan pemerintah desa dalam menetapkan rencana kedepan BUMDes di Desa Pararra.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan pengelola dan pemerintah desa sehingga menghasilkan AD/ART yang akan dijadikan pedoman dalam mengelola BUMDes. Bagaimana dengan mendiskusikan dengan teori Nawawi (2003:52) bahwa perencanaan merupakan serangkaian proses manajemen, pemelihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya dan penetapan secara sistematis untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil wawancara dengan ketua pengelola BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Perencanaan di awali dengan pertemuan-pertemuan seperti rapat, dari situ kita merencanakan program yang akan direncanakan dan system keuangannya itu kita cuma satu pintu yaitu bendahara saja”³⁴

³⁴ Rusdin, Ketua BUMDes, “Wawancara”. 23 September 2022.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa perencanaan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pararra selalu diawali dengan pertemuan rapat guna menyusun perencanaan dan merencanakan program untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan Rachmat (2014) bahwa perencanaan yaitu proses kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki dan menentukan prioritas ke depan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dasar organisasi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan sekretaris BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Tentunya dalam hal ini persoalan keberhasilan dan perencanaan pengelolaan BUMDes yang dibutuhkan oleh pengurus itu ialah masyarakat yang betul-betul ingin meningkatkan kualitas dan meningkatkan sumber pendapatan di wilayah tertentu, terutama disetiap dusun”³⁵

Dengan adanya hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam mengelola BUMDes untuk mencapai suatu keberhasilan yaitu dibutuhkan peran masyarakat yang benar-benar ingin meningkatkan pendapatan sehingga dapat membantu proses pengelolaan BUMDes di Desa Pararra. Seperti yang didiskusikan dengan Purnomo (2004) bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa.

Kemudian ditambahkan oleh bendahara BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

³⁵ Hanis, Sekretaris BUMDes, “Wawancara”. 23 September 2022.

“Kalau berbicara tentang perencanaan kami dari pengelola BUMDes hanya menginginkan dari pemerintah sekiranya bisa melebihi upaya dari anggaran-anggaran BUMDes. Tentu dalam hal ini kami akan merencanakan dengan sebaik mungkin dan bisa meratakan persoalan *planning-planning* kedepannya untuk masyarakat BUMDes sehingga tidak ada lagi interpersi antara masyarakat yang mendapatkan dan masyarakat yang tidak mendapatkan, dan sekiranya itu bisa meratakan untuk masyarakat yang betul-betul ingin memproduktifkan anggaran BUMDes dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan (*planning*) tersebut menginginkan Pemerintah Desa agar melebihi upaya anggaran BUMDes agar pengelola dapat meratakan perencanaan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi interpersi antara masyarakat yang mendapatkan dan tidak mendapatkan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra menyusun pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya serta penempatan orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat, dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mencari masyarakat yang ingin mengelola BUMDes kemudian menyusun rencana kerja beserta fungsi dari masing-masing pengelola agar saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan BUMDes Ta Dung Maupa Desa Pararra. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pararra yang mengatakan bahwa :

³⁶ Nurfaika, Bendahara BUMDes, “Wawancara”. 23 September 2022.

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji mempunyai susunan kepengurusan yang terdiri dari penasihat yakni kepala desa, pelaksana operasional yang terdiri dari masyarakat desa serta pengelola. Susunan tersebut dihasilkan dalam musyawarah desa agar setiap pengurus yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes paham akan tugas dan tanggungjawab masing-masing agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengorganisasian dilakukan agar setiap pengurus pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pararra mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar mencapai tujuan yang maksimal. Seperti yang dikatakan Nawawi (2003:52) bahwa pengorganisasian merupakan kerjasama kelompok orang yang dilakukan dengan pembedangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu-satuan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing diikuti dengan mengatur hubungan kerja. Adapun hasil wawancara penulis dengan sekretaris pengelola BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa :

“Untuk membangun suatu komunikasi antara tim kerja sangat dibutuhkan persoalan kerjasama, persoalan transparansi dan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan komunikasi kerja. Dan BUMDes di Desa Pararra pada umumnya memiliki tujuan yang sama dan pada saat ini BUMDes Maccini Baji masuk dalam kategori aktif dalam mengelola.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian BUMDes di Desa Pararra memiliki tujuan yang sama dan tentunya membutuhkan kerjasama antara pengelola dan masyarakat demi meningkatnya komunikasi kerja. Sama halnya yang dijelaskan dalam buku referensi Administrasi, Organisasi dan Manajemen (Nunung, 2020) bahwa

³⁷ Nirwan L, Penasehat BUMDes, “Wawancara”. 23 September 2022.

organizing (penyusunan) adalah suatu kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dilanjutkan wawancara dengan ketua pengelola BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Dalam menyusun pembagian kerja di BUMDes Pararra guna meningkatkan komunikasi kerja antara pengelola dan masyarakat dikembalikan kepada para penanggungjawab masing-masing unit usaha yang akan menyusun kembali rancangan-rancangan pengelolaan terhadap penerima bantuan dana usaha agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.”³⁸

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian BUMDes di Desa Pararra melakukan sistem pembangunan komunikasi kerja dan dalam penyusunan pembagian kerja berdasarkan penanggungjawab masing-masing unit usaha. Dalam pengorganisasian menurut Rachmat (2014) yaitu proses penyusunan pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya serta penempatan orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat.

Kemudian ditambahkan hasil wawancara dengan bendahara pengelola BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Kami pengelola BUMDes tetap melakukan *planning step by step* atau perencanaan yang tertib. Dan pihak pengelola berupaya bernegosiasi dengan Pemerintah Desa terkait pejabaran mengenai BUMDes dan tetap melakukan komunikasi yang baik mengenai anggaran yang ada di Pemerintah Desa dan tetap mengusahakan persoalan membangun komunikasi yang baik agar paham dengan sisi kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat tersebut.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelola BUMDes di Desa Pararra tetap mengupayakan negosiasi dengan

³⁸ Rusdin, Ketua BUMDes, “Wawancara”. 23 September 2022.

³⁹ Nurfaika, Bendahara BUMDes, “Wawancara”. 23 September 2022.

Pemerintah Desa mengenai penyusunan pembagian kerja beserta fungsi dan anggaran, kemudian berupaya membangun komunikasi yang baik. Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat Desa Pararra bahwa :

“Dalam menentukan orang-orang yang ingin mengelola BUMDes Desa Pararra merupakan orang yang berdomisili di Desa ini dan memenuhi syarat, mau mengelola usaha dan tidak memiliki kaitan pada pemerintahan di Desa.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penempatan orang-orang yang ingin mengelola BUMDes harus memenuhi syarat dan tidak memiliki ikatan di pemerintahan desa. Seperti yang tercantum dalam AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra yaitu berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengarahan (*directing*)

yang dimaksud adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Aktivitas memberikan pengarahan, instruksi hingga perintah untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Pengarahan juga sering disebut dengan fungsi *actuating* (menggerakkan) yang dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan (*leadership*) yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan anggotanya dengan baik dan saling kerja sama serta komunikasi bagaimana agar menyampaikan pesan yang memotivasi. Pengarahan yang baik

⁴⁰ Yurni, Masyarakat, “Wawancara”. 22 September 2022.

terhadap masyarakat akan mencapai keberhasilan pengelolaan BUMDes di Desa Pararra.

Pengarahan yang dilakukan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dengan memberikan bimbingan atau arahan serta memonitoring usaha agar berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Sebagai penasihat dalam pengelolaan BUMDes tentu saya memiliki peran dalam mengawasi serta memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes serta memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes di Desa Pararra dan memiliki tanggungjawab dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes agar mencapai keberhasilan.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pararra peneliti bisa menyimpulkan bahwa pengarahan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penasihat yang berperan sebagai kepemimpinan (*leadership*) sangat berperan penting dalam pengelolaan karena dapat memberikan nasehat, saran dan pendapat agar bisa mengarahkan anggotanya dengan baik dan saling bekerja sama serta komunikasi bagaimana agar menyampaikan pesan yang memotivasi terkait masalah yang ada dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pararra.

Adapun hasil wawancara dengan ketua pengelola BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku pengelola dalam mengarahkan anggota dan masyarakat yang mendapatkan dana usaha selalu melakukan pengontrolan agar perencanaan yang sebelumnya telah disepakati berjalan dengan baik tanpa hambatan, selanjutnya kami juga mengawasi kerja anggota yang bergabung dalam

⁴¹ Nirwan L, Penasehat BUMDes, “Wawancara”. 23 September 2022.

pengelola dan penanggungjawab unit usaha BUMDes terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan dana usaha serta memonitoring hasil kerja kemudian mengarahkan untuk melakukan evaluasi agar dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi di lapangan”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengarahan yang dilakukan pengelola yaitu mengontrol, mengawasi dan monitoring hasil kerja kemudian mengadakan evaluasi. Sama halnya yang dikatakan oleh Stahl dan Grisby (1998) bahwa terdapat 6 (enam) langkah evaluasi dan kontrol antara lain menentukan apa yang akan dikontrol, membuat seperangkat standar, mengukur hasil, membandingkan antara hasil dengan standar, mencari alasan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi.

Berikutnya hasil wawancara dengan sekretaris pengelola BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Dalam pengarahan sebuah organisasi yang ada di BUMDes Desa Pararra ini selalu berpatok pada saran dan perintah terutama membimbing masyarakat yang kurang berpengalaman dalam mengelola agar yang menjadi kendala di BUMDes dapat diperbaiki dengan saran-saran yang ada sehingga dapat termotivasi bekerja lebih giat untuk tercapainya tujuan dari BUMDes yang ada di Desa Pararra.”⁴³

Adapun hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa di dalam mengelola BUMDes di Desa Pararra tentunya pada pengarahan pihak pengelola memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat yang ingin mengelola serta memberikan saran dan perintah agar tercapainya tujuan dari BUMDes tersebut.

Kemudian ditambahkan wawancara oleh bendahara pengelola BUMDes yang mengatakan bahwa :

⁴² Rusdin, Ketua BUMDes, “Wawancara”. 23 September 2022.

⁴³ Hanis, Sekretaris BUMDes, “Wawancara”. 23 September 2022.

“Dalam pengarahan yang dilakukan pengelola BUMDes tidak lepas dari mengarahkan anggotanya yang memiliki masalah, tentu peran pengelola disini untuk memberikan saran dan membimbing anggotanya lebih baik lagi agar bisa menghasilkan usaha yang berhasil yang mencapai tujuan BUMDes”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengarahan pengelola BUMDes tidak jauh dari memberikan saran dan bimbingan kepada anggotanya agar mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Pengevaluasian (*evaluating*)

Dalam pengevaluasian terdapat proses pengawasan dan pengendalian performa organisasi untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut Sondang, merupakan suatu proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas suatu organisasi agar menjamin seluruh tugas yang dilakukan berjalan sesuai keinginan dan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pengendalian yang dimaksud adalah tahap pemantauan dan pemeriksaan oleh pemimpin untuk mengetahui hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pararra.

Pengevaluasian yang dimaksud dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dengan melaporkan setiap hasil kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga pemerintah desa dapat mengetahui kegiatan dalam pengelolaan BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang mengatakan bahwa :

⁴⁴ Nurfaika, Bendahara BUMDes.” Wawancara”. 23 September 2022”

“Untuk evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Pararra itu melakukan laporan kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat untuk mempertanggung jawabkan dan mentransparansikan laporan keuangan yang masuk agar kami sebagai pengurus Badan Usaha Milik Desa dapat mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki sehingga kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pararra peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengevaluasian dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pararra melakukan laporan pertanggung jawaban agar dapat mengevaluasi hal-hal yang menjadi kendala, dalam pengevaluasian terdapat proses pengawasan dan pengendalian. Pengawasan menurut sondang, merupakan suatu proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas suatu organisasi agar menjamin seluruh tugas yang dilakukan berjalan sesuai keinginan dan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pengendalian yang dimaksud adalah tahap pemantauan dan pemeriksaan oleh pemimpin untuk mengetahui hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun hasil wawancara dengan ketua pengelola BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal pelaksanaan BUMDes kami selaku pengelola tetap mengamati dan mengadakan evaluasi tiap tri wulan (3 bulan), tiap 6 bulan dan pertahun agar kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes bisa kami evaluasi kembali dan kami selaku pengelola juga tetap menerima kritikan serta saran yang ditujukan pada pengelola BUMDes di Pararra”

Kemudian ditambahkan oleh sekretaris pengelola BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa:

“Jika ingin mengacu dengan aturan kemandagri tentu ada inspektorat yang diturunkan dilapangan persoalan anggaran-anggaran desa dan anggaran usaha desa. Maka dalam hal ini kami tetap mengupayakan akan diadakan evaluasi setiap tahunan dan kami menerima persoalan evaluasi itu baik dari tingkat kecamatan, tingkat daerah yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini.”⁴⁶

⁴⁵ Nirwan L, Penasehat BUMDes.” Wawancara” . 23 September 2022.

⁴⁶ Rusdin, Ketua BUMDes. ”Wawancara” 23 September 2022

Hal serupa juga dikatakan oleh bendahara pengelola BUMDes Desa Pararra :

“Dalam tekhnis ini selama perencanaan hingga ditahap evaluasi tetap melakukan adanya transparansi kepada masyarakat dan pihak yang turut mengevaluasi hasil BUMDes sehingga kami bisa mengetahui apa saja yang menjadi kendala hingga pencarian solusi disetiap masalah yang ada”⁴⁷

Berdasarkan apa yang telah di paparkan oleh pengelola BUMDes di Desa Pararra, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Pararra yang bersangkutan dan pengelola beserta masyarakat mengadakan evaluasi tiap per 3 bulan, 6 bulan serta pertahunan agar melaporkan hasil yang telah dicapai dan mentransparansikan dana yang masuk sehingga tidak ada kekeliruan persoalan dana BUMDes di Desa Pararra. Dalam hal ini tertuang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pararra pada pasal 8 bahwa pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksa operasional BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat yang hadir dalam pengevaluasian pengelolaan BUMDes di Desa Pararra yang mengatakan bahwa :

“Setiap akan diadakan evaluasi BUMDes pihak masyarakat selalu dilibatkan untuk menghadiri evaluasi tersebut agar tidak adanya kesalahpahaman antara Pemerintah Desa, pengelola dan masyarakat”⁴⁸

Seperti yang dikatakan juga oleh masyarakat yang berbeda terkait evaluasi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pararra bahwa :

⁴⁷ Nurfaika, Bendahara BUMDes. “Wawancara” 23 September 2022

⁴⁸ Husni, Masyarakat. “ Wawancara” 24 September 2022

“Pada pelaporan hasil pengelolaan BUMDes yang diadakan tiap tahun kami dan tokoh masyarakat lainnya dilibatkan dalam pengevaluasian dan pemecahan masalah yang terjadi dilapangan serta menyaksikan transparansi dana BUMDes tersebut”⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi hasil laporan pengelolaan BUMDes di Desa Pararra tetap melibatkan masyarakat agar hasil laporan dapat diketahui sehingga tidak adanya kesalahpahaman.

2. Efektivitas BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Parara Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

BUMDes didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat pedesaan tentunya memiliki dasar hukum dari Pemerintah Desa yaitu tentang pengelolaan BUMDes. Tuntunan hukum tentang pengelolaan BUMDes belum dibentuk akan tetapi pemerintah daerah mengacu kepada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa berhak mendirikan lembaga usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. Selain itu, Undang-Undang No.5 Tahun 2016 juga membahas tentang BUMDes akan tetapi belum dijelaskan secara rinci. Berhasil tidaknya pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari cara yang dilakukan oleh pengelola dalam menjalankan setiap unit usaha dalam BUMDes.

BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa yang pengelolaannya berbeda dengan aset desa yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, pendapatan desa dan meningkatkan segala potensi yang dimiliki oleh desa sebagai upaya menciptakan desa yang mandiri bagi masyarakat dan desa. Kehadiran BUMDes merupakan suatu upaya yang

⁴⁹ Ludiawati, Masyarakat. “Wawancara” 24 September 2022

dilakukan untuk memberdayakan ekonomi di wilayah pedesaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Kehadiran BUMDes sebagai upaya pemberdayaan ekonomi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik karena berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari sumber finansial, unit usaha maupun keterlibatan masyarakat yang masih minim.

Banyaknya kendala yang dihadapi oleh BUMDes menjadikan kurang efektifnya BUMDes dalam menjalankan usahanya terlebih dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Efektivitas merupakan keberhasilan yang diperoleh melalui cara tertentu agar mampu mencapai sebuah tujuan. Efektivitas dalam pemberdayaan ekonomi merupakan suatu keberhasilan yang diperoleh melalui pelaksanaan secara langsung yang mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan agar mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat yaitu adanya peningkatan diri dan ekonominya. Pemberdayaan ekonomi dilaksanakan sebagai suatu upaya pendekatan kepada masyarakat yang merupakan pemegang kendali dalam suatu pemberdayaan yaitu dengan meningkatkan produktivitas rakyat.

BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra memiliki SDM yang secara kualitas masih sangat kurang sehingga dibutuhkan suatu upaya agar dapat meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola BUMDes. Dari segi kualitas, sumber daya manusia yang ada tidak terlalu paham dengan pemanfaatan teknologi yang berdampak kepada pengelolaan maupun pembukuan dikerjakan secara manual.

Setelah peneliti mengumpulkan data dari penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi

selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh di lapangan sesuai dengan teknik analisis data yang telah ditentukan yaitu analisis data dengan model *miles dan huberman* yaitu dengan mereduksi data, menyajikan dan selanjutnya menarik kesimpulan, untuk mengungkapkan fenomena yang sedang berlangsung yaitu bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan BUMDes Ta' Dung Maupa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pararra.

a. Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra dilandasi peraturan Desa No.21 Tahun 2015. Pendirian BUMDes merupakan upaya yang digunakan untuk mengelola potensi ekonomi desa yang dilakukan oleh seluruh aspek masyarakat termasuk pemerintah yang memiliki otoritas terhadap kebijakan. Dalam pemberdayaan ekonomi, BUMDes harus berperan aktif untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan yang dijalankan.

Pemerintah sebagai otoritas dari seluruh kebijakan yang ada di desa memegang kendali untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan BUMDes dengan membina masyarakat dalam meningkatkan potensi dan skill dengan tujuan agar mampu mengembangkan program-program yang akan dilaksanakan oleh BUMDes.

b. Pelaksanaan BUMDes

Program BUMDes Ta'Dung Maupa Desa Pararra merupakan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan membangun perekonomian masyarakat. Membangun perekonomian masyarakat tentunya diikuti dengan ketersediaan

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat diolah dan dikembangkan. Pelaksanaan program BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra dalam upaya pemberdayaan ekonomi dijalankan lewat unit usaha dengan tujuan agar mampu mengelola sumber daya yang ada dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

Pelaksanaan BUMDes yang diharapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada diwilayah pedesaan belum sesuai harapan. Pengelolaan unit usaha yang masih terbatas menjadikan program pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes belum efektif.

1) Unit usaha BUMDes Ta Dung Maupa Desa Pararra

Pada tahun 2022 pengelolaan unit usaha BUMDes hanya mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 saja. Penyertaan modal yang dianggarkan dari tahun 2016 sebesar 70.000.000 sampai dengan tahun 2022, belum mampu membangkitkan perekonomian masyarakat diwilayah Desa Pararra.

a) Unit Usaha Simpan Pinjam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unit usaha ini merupakan unit usaha yang menjalankan bisnis uang. Usaha simpan pinjam ditujukan agar mampu menyediakan modal usaha kepada masyarakat dalam mengelola ataupun menjalankan setiap usaha yang dijalankan. Akan tetapi, jenis usaha yang dijalankan ini mengalami berbagai permasalahan seperti penyaluran dana yang terbatas kepada masyarakat ataupun ketidakmampuan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman.

Seperti yang di katakan oleh ketua BUMDes bapak Rusdin saat di lakukan wawancara.

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Ta' Dung Maupa saat ini diharapkan agar mampu diselesaikan secepatnya. Pengelola BUMDes dan pemerintah sebagai pengawas harus mampu mencari solusi yang efektif agar Tujuan BUMDes dapat dicapai dengan baik.

BUMDes Ta' Dung Maupa berdiri sejak tanggal 29 Juli 2016 namun kontribusinya terhadap masyarakat masih sangat kurang. Unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha pertama dan pokok yang dijalankan oleh BUMDes belum mampu memberikan efek kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan unit usaha ini dapat disimpulkan berdasarkan atas informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Penyaluran dana kepada masyarakat dibatasi oleh pengelola BUMDes
2. Persentase bunga dirasa memberatkan masyarakat
3. Pengembalian modal usaha mengalami kemacetan
4. Penyaluran dana usaha fokus kepada satu wilayah.

Dari beberapa poin permasalahan dalam unit usaha simpan pinjam yang diperoleh peneliti dalam wawancara, dapat disimpulkan bahwa unit usaha simpan pinjam yang ada di BUMDes Ta' Dung Maupa belum efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Ta Dung Maupa saat ini diharapkan agar mampu diselesaikan secepatnya. Pengelola BUMDes harus mampu mencari solusi agar komunikasi dengan masyarakat berjalan dengan baik.

b) Token Listrik

Token listrik merupakan salah satu unit usaha yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pararra oleh karena itu pemerintah berupaya untuk melakukan pengadaan unit usaha tersebut melalui BUMDes. Seperti yang kita ketahui bahwa token listrik merupakan kebutuhan sehari-hari yang akan dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya masyarakat berpendapat bahwa jasa pengadaan token listrik ini sangat membantu masyarakat ketika belum memiliki dana untuk membayar tagihan listrik. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari unit usaha tersebut. Akan tetapi jenis usaha ini belum bisa dikatakan efektif karena masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh terkait dengan pengadaan token listrik dengan alasan bahwa tidak semua masyarakat khususnya rumah tangga merasakan manfaat dari unit usaha tersebut karena terbatasnya jumlah member yang ditetapkan oleh pihak pemerintah sehingga sebagian masyarakat merasakan kecemburuan sosial dan adanya pilih kasih dari pihak pemerintah.

Sejalan dengan berbagai hasil wawancara sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jenis usaha ini sebenarnya sangat direspon dengan baik oleh masyarakat setempat, akan tetapi dengan adanya masalah yang telah disebutkan tadi maka hal ini menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menerima token listrik tidak merata apalagi ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa pemberian token listrik ini tidak semua diperuntukkan kepada masyarakat menengah kebawah, sehingga masyarakat menilai bahwa hal ini tidak

layak.

c) Penyewaan Kursi

Penyewaan kursi merupakan salah satu usaha yang ada di Desa Pararra dengan tujuan membantu masyarakat ketika melakukan kegiatan yang terkendala pada pengadaan kursi. Seperti yang kita ketahui bahwa kursi merupakan salah satu kebutuhan di berbagai hajatan penting sehingga BUMDes Ta' Dung Maupa menjembatani hal tersebut agar masyarakat mudah untuk memanfaatkannya.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa unit usaha penyewaan kursi yang di Kelola oleh BUMDes Ta' Dung Maupa di Desa Pararra dapat dikatakan efektif karena banyaknya masyarakat yang memanfaatkan unit usaha tersebut dengan berbagai alasan bahwa tarif yang ditetapkan pihak pengelola unit usaha tergolong murah sehingga masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah masih bisa menjangkau hal tersebut. Selain itu dengan adanya unit usaha tersebut pemerintah setempat mampu memberdayakan masyarakatnya melalui kegiatan unit usaha tersebut.

Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam upaya pemberdayaan ekonomi, ada beberapa elemen yang harus dipenuhi yaitu: kerjasama, kemauan, kepemimpinan, kerja keras dan organisasi yang terbina. Selain itu, untuk mencapai sebuah tujuan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi faktor yang mempengaruhi yaitu semangat dan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi merupakan pelibatan kepada masyarakat yang berperan sebagai pelaku pemberdayaan, dimana berhasil tidaknya suatu upaya pemberdayaan tergantung dari respon masyarakat, tanggung jawab terhadap program yang dijalankan.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan saat ini merupakan upaya dalam percepatan pengembangan potensi dari sektor riil maupun dari perekonomian kepada suatu wilayah. Pembangunan dalam hal pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu menghilangkan kesenjangan yang ada pada suatu wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.

Berdasarkan dengan temuan yang diperoleh peneliti dan aspek dari teori yang digunakan, dapat menyimpulkan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes merupakan upaya yang dilakukan dalam pembangunan sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.72 tahun 2005 tentang Desa. Pendirian BUMDes dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan potensi yang ada di Desa dan kebutuhan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra harus menyeluruh secara luas kepada suatu aspek karena kemajuan suatu wilayah tidak dapat diukur dari satu aspek saja.

BUMDes Ta' Dung Maupa dalam menjalankan usahanya mengalami berbagai kendala, sehingga perlu melakukan berbagai upaya kerja sama dengan pihak lain agar mampu mengelola BUMDes dengan Baik dan selalu melakukan pemantauan terhadap program yang sudah ada dengan penggunaan manajemen yang baik agar mampu berkembang dengan baik.

Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes terdiri dari tiga unit usaha. Namun usaha yang dijalankan oleh BUMDes belum mampu memberikan efek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pararra. Penyebab dari kurang efektifnya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes dalam unit usaha ini karena

pengelolaan yang belum maksimal, keterbatasan modal, partisipasi masyarakat dan sebagainya.

2) Strategi Pengelolaan

Pengelolaan BUMDes diatur dalam dalam Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 yang mengatur secara jelas dan detail pengelolaan, pelaksanaan dan teknis BUMDes yang disertai dengan peran dan fungsi pengelola BUMDes. Dengan adanya landasan hukum, pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional, mandiri agar mampu menghasilkan SDM yang kompeten didalamnya, yaitu dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan AD/ART BUMDes. BUMDes Ta' Dung Maupa merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat Desa, meskipun berdasarkan atas data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes belum mampu memberikan efek kepada masyarakat. Penyebabnya adalah karena kualitas SDM yang ada di BUMDes masih sangat minim, dimana kemajuan suatu lembaga berasal dari kualitas SDM yang ada didalamnya.

Pembentukan BUMDes Ta Dung Maupa dilakukan dengan musyawarah yang bertujuan untuk membentuk Peraturan Desa yang mengatur pelaksanaan BUMDes, pengelolaan, dan mengukur perkembangan BUMDes dalam setiap tahap kegiatan yang tujuannya untuk mengetahui apakah BUMDes mampu memberikan efek kepada masyarakat, pengurus dan pendapatan asli desa.

Pembentukan BUMDes yang dilakukan dengan jalan musyawarah memerlukan acuan agar mampu membuat aturan-aturan dalam mengatur lembaga.

Aturan yang dibentuk adalah Perdes No.21 tahun 2015 yang menjadi sebuah acuan dalam menuntun pengurus BUMDes Ta Dung Maupa menjalankan usaha-usaha selama periode tertentu sebelum adanya Perdes BUMDes yang diturunkan langsung oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, BUMDes didirikan dengan tujuan agar Desa mampu mengelola segala potensi yang ada didalamnya sesuai dengan UU No.32 tahun 2004.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa maupun meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, BUMDes Ta Dung Maupa melakukan upaya dengan merangkul berbagai elemen masyarakat yang dijadikan sebagai mitra kerja atau sebagai subjek pengembangan. Keterlibatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa mampu memberikan informasi kepada pengelola BUMDes untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang ada di desa.

Pelaksanaan program BUMDes merupakan sebuah serangkaian dalam upaya pemberdayaan ekonomi yang bersifat program pembangunan partisipatif agar mampu meningkatkan peran masyarakat untuk membangun wilayahnya.⁸³

Salah satu strategi yang digunakan dalam upaya pembangunan masyarakat, di Negara yang sedang berkembang adalah *community development* atau pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak Negara-negara berada dalam masa penjajahan. Hal ini merupakan bagian dari luasnya penerapan pemberdayaan masyarakat sejak masa penjajahan. Secara umum, tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain adalah upaya dalam perbaikan taraf hidup manusia.

Dengan adanya BUMDes di Desa Pararra diharapkan agar membawa dampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Desa Pararra, meskipun data yang diperoleh dilapangan efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan melalui BUMDes belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat Desa Pararra. Berikut adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan terkait dengan kondisi wilayah Desa Pararra:

a) Kondisi Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Pararra dalam memenuhi kebutuhannya bekerja sebagai petani. Hal ini didukung oleh kondisi alam dan lingkungan sekitar yang memiliki potensi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat yang bekerja dibidang pertukangan dan pegawai negeri sipil hanya beberapa orang saja.

Secara garis besar masyarakat Desa Pararra mencari rejeki melalui kegiatan pertanian yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan potensi sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui ketersediaan SDA dan potensi yang ada, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan pendapatannya.

b) Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat Desa Pararra masih tentram dan damai. Dari jumlah penduduk sekitar 1.540 jiwa yang diantaranya mayoritas beragama islam. Hubungan antar masyarakat masih terjalin dengan baik yaitu masih kentalnya budaya tolong menolong dan toleransi sesama umat beragama.

c) Kondisi Lingkungan Alam

Kondisi lingkungan alam Desa Pararra masih terjaga dan masih asri seperti:

- (1) Kondisi lingkungan masih tergolong bersih
 - (2) Halaman dan pekarangan rumah masyarakat masih luas
 - (3) Kesadaran akan kebersihan masih terjaga
 - (4) Keadaan alam masih terjaga
- 3) Problem BUMDes dalam upaya pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan agar mampu efektif dalam pelaksanaan peranan, BUMDes tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi dalam mencapai suatu tujuan. Faktor itu merupakan faktor internal yang merupakan penghambat dari dalam sebuah lembaga dan eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi dari luar. Seperti halnya dengan BUMDes Ta' Dung Maupa, yang saat ini belum mampu memberikan efektivitas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Desa Pararra.

Adapun faktor yang menjadi penghambat tidak efektivitas pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra adalah sebagai berikut:

a) Lingkungan internal

Faktor penghambat dalam organisasi merupakan hal yang menjadi sebuah kelemahan yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya program atau usaha yang dijalankan. Kelemahan yang terjadi dalam sebuah organisasi menjadi titik terendah yang membutuhkan sebuah semangat untuk membangkitkan semangat dalam membangun organisasi. 87 Dalam organisasi atau perusahaan, faktor penghambat dalam menjalankan ataupun untuk mencapai sebuah tujuan pasti ada.

Permasalahan BUMDes Ta' Dung Maupa muncul seiring berkembangnya pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Ta' Dung Maupa. Permasalahan yang

berasal dari lingkungan internal BUMDes adalah sebagai berikut:

(1) Rendahnya Kualitas SDM

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan berasal dari kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan kurangnya peningkatan terhadap kemajuan suatu organisasi. BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra memiliki beberapa unit usaha yang hanya dikelola oleh 6 pengurus. 2 diantaranya berprofesi sebagai guru honorer dan PNS, dan 4 diantaranya berprofesi sebagai staf Desa. Latar belakang dari pengurus dan pengelola BUMDes merupakan guru dan Staf dan kemampuannya dalam mengelola BUMDes masih terbatas.

Pengelola sebuah lembaga usaha harus memiliki kualitas yang baik bukanlah SDM yang kompetensi pas-pasan, melainkan SDM yang multi-dimensi yaitu SDM yang memiliki kompetensi sebagai seorang ahli investasi, ahli dalam mengatur keuangan, beretika dan memahami aturan.

(2) Unit usaha yang dijalankan masih terbatas

Unit usaha merupakan sebuah tawaran yang diberikan oleh pihak lembaga ataupun organisasi sebagai upaya dalam memperoleh keuntungan. BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra saat ini menjalankan usahanya dalam 3 kelompok yaitu simpan pinjam, saprodi dan penyewaan alat mollen. Unit usaha yang dijalankan BUMDes Ta'Dung Maupa saat ini tidak berjalan dengan baik karena usaha yang dijalankan oleh BUMDes kurang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Selain itu melalui wawancara yang dilakukan sebelumnya, dapat diperoleh sebuah informasi bahwa unit usaha seperti saprodi yang dijalankan oleh BUMDes

mengalami kemacetan dan harga jual yang ditawarkan oleh BUMDes kepada masyarakat terlalu tinggi. Senada dengan itu, tingginya persentase bunga yang dibebankan kepada masyarakat menjadi salah satu penghambat kemampuan masyarakat mengembalikan peminjamannya. (3) Intervensi dari Pemerintah Desa

Intervensi dari pemerintah desa juga merupakan salah satu penghambat kemajuan dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Hal ini merupakan hal yang paling penting mengingat pengelola adalah sumber daya utama yang menggerakkan roda organisasi. Pemerintah dalam ranah BUMDes hanya berperan sebagai pengawas terhadap lembaga usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 11 ayat 1 menyatakan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dijabat secara ex office oleh Kepala Desa yang bersangkutan, yaitu memberikan nasihat kepada pelaksana BUMDes, saran, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan BUMDes dengan maksud meminta penjelasan dan melindungi usaha yang dijalankan oleh BUMDes.⁸⁸

Berdasarkan atas data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pengelola BUMDes, sejak berdirinya BUMDes intervensi atau tekanan dari pemerintah desa sangat besar sehingga efektivitas dari pengelolaan BUMDes yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan terhambat. Selain itu, dengan adanya intervensi dari pihak pemerintah mengakibatkan SDM yang ada

dalam BUMDes melakukan pengunduran diri.

(4) Belum Ada Sosialisasi BUMDes dan Dana BUMDes

Kendala yang dihadapi oleh BUMDes Ta Dung Maupa saat ini adalah belum adanya sosialisasi tentang BUMDes dan pelaksanaan yang berkaitan dengan usahanya sehingga minat masyarakat dalam menyukseskan BUMDes sangat terbatas. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BUMDes Berkah Desa Pararra berdampak kepada unit usaha yang dijalankan yaitu tidak berjalan dengan baik karena pemahaman masyarakat terbatas. Selain itu, dengan adanya sosialisasi mengenai BUMDes pengelola BUMDes dapat mengetahui segala kebutuhan masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan akan memberikan gambaran ataupun transparansi dalam pengelolaan anggaran yang merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap lembaga harus terbuka kepada masyarakat umum agar mudah dalam memperoleh sebuah informasi.⁸⁹

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara menyatakan bahwa masyarakat yang ada di wilayah Desa Pararra tidak mengetahui berapa dana yang telah dikelola oleh BUMDes. Dari hasil wawancara dengan pengelola BUMDes diperoleh data bahwa total dana yang dikelola BUMDes saat ini berjumlah 94,000,000 yang disalurkan dalam unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

(5) Kurangnya Sumber Daya Finansial

Ketersediaan sumber daya finansial dalam pengelolaan BUMDes Ta Dung

Maupa Desa Pararra merupakan salah satu faktor penghambat mengapa BUMDes Ta Dung Maupa Desa Pararra belum efektif dalam menjalankan usahanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pengelola BUMDes diperoleh informasi bahwa anggaran dana BUMDes tiap tahunnya hanya berada di angka Rp.5.000.000 saja.

Ketidakmampuan dalam memenuhi sumber daya finansial ini menjadi permasalahan yang muncul dalam lingkungan internal BUMDes. Ketersediaan sumber daya finansial ini diharapkan oleh pengelola BUMDes agar bisa bertambah sehingga mampu memberdayakan masyarakat dan menambah fasilitas yang ada untuk BUMDes.

b) Lingkungan Eksternal

Faktor penghambat efektivitas pemberdayaan ekonomi tidak hanya berasal dari dalam lingkungan internal saja melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, yaitu sebagai berikut:

(1) Meningkatnya Pesaing Usaha

Meningkatnya pesaing dalam usaha bisnis merupakan hal yang umum terjadi. BUMDes Ta Dung Maupa Desa Pararra menjalankan kegiatan usahanya sejak awal berdirinya pada tahun 2015. Persaingan dalam usaha muncul dari akibat kelemahan dan kurangnya pengelolaan BUMDes Ta Dung Maupa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Kebutuhan masyarakat menjadi faktor penentu didirikannya BUMDes Ta Dung Maupa. Pengelolaan BUMDes Ta' Dung Maupa dalam satu tahun terakhir tergolong sangat lambat. Berdasarkan dengan laporan keuangan BUMDes Ta Dung

Maupa, diperoleh data bahwa keuntungan yang diperoleh BUMDes pada tahun 2022 hanya sebesar Rp.4,000,000-, dari seluruh unit usaha yang dijalankan.

Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya dengan Ibu Mirna yang mengatakan adanya batasan dalam peminjaman modal usaha dan persentase bunga pokok yang tidak seimbang dengan peminjaman, memaksakan diri untuk melakukan peminjaman di bank tanpa adanya persyaratan yang berbelit.

Sumber pendanaan yang berasal dari APB Desa menjadi faktor penghambat karena proses dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan LKM memiliki sumber pendanaan yang berasal dari pihak swasta.

(2) Gaya Hidup Masyarakat

Gaya hidup dalam masyarakat merupakan suatu budaya yang mempengaruhi kinerja BUMDes Ta' Dung Maupa dalam upaya pemberdayaan Masyarakat. Budaya dapat diartikan sebagai kebiasaan yang selalu dilakukan dan sulit diatasi. Keadaan kebudayaan masyarakat yang ada di Desa Pararra masih sangat terjaga terutama dalam masalah toleransi antar umat beragama dan pemenuhan kebutuhan yang berasal dari pertanian. BUMDes Ta' Dung Maupa menjalankan unit usaha dalam beberapa unit. Kehidupan masyarakat yang bersumber dari hasil pertanian menjadikan BUMDes tidak produktif dalam menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya pada pembahasan menyatakan bahwa penduduk desa mayoritas bekerja sebagai petani dan BUMDes menjalankan unit usahanya berdasarkan dengan kebutuhan

masyarakat. Akan tetapi, usaha yang dijalankan oleh BUMDes tidak berjalan dengan baik yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan baik untuk pertanian maupun sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Pengelolaan BUMDes Di Desa Pararra memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan, sebab strategi memberikan arah, tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang dapat memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi. Akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dimana sistem pengelolaan BUMDes di Desa Pararra masih terbilang belum efektif dengan alasan dari segi konsep yang digunakan oleh pemerintah memang sudah sangat terstruktur akan tetapi, ketika menjalan berbagai strategi yang telah direncanakan masih belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

2. Efektivitas pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pararra belum mampu memberikan efek terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Pararra. Kurang efektifnya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat seperti pelaksanaan BUMDes melalui unit usaha yang tidak berjalan baik, strategi pengelolaan yang tidak efektif. Selain itu, intervensi dari pihak Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor yang menghambat tidak efektifnya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes. Meskipun pemberdayaan

ekonomi melalui BUMDes belum memberikan efek terhadap masyarakat, namun BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra terus mengalami pengembangan dalam segi pengelolaan maupun dari segi unit usaha yang dijalankan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas penduduk Desa Pararra adalah beragama islam. Sehingga usaha yang dijalankan oleh BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra diharapkan agar menghapus penyertaan bunga dalam usaha simpan pinjam menjadi sistem bagi hasil.
2. Melakukan perekrutan pengurus BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra agar pengelolaan unit usaha bisa dijalankan secara maksimal. Tentunya untuk mencapai keberhasilan itu perlu adanya pembinaan ataupun pelatihan yang diberikan kepada pengelola secara bertahap.
3. BUMDes Ta' Dung Maupa Desa Pararra perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu dalam proses pengelolaan unit-unit usaha BUMDes, seperti penyedia modal usaha maupun penyedia kebutuhan masyarakat lainnya.
4. Pemerintah sebagai otoritas dari kebijakan tertinggi di desa agar tidak melakukan intervensi terhadap pengelola BUMDes. Pemerintah dalam hal ini cukup menjadi pengawas tanpa terlibat dalam usaha BUMDes.
5. Tidak adanya diskriminasi dalam penyaluran dana melalui BUMDes
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BUMDes agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa, pengurus dan masyarakat

7. Kepala Desa lebih aktif lagi dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dalam memberikan nasehat, saran dan pendapat serta mengontrol pelaksanaan pengelolaan BUMDes agar dana yang ada tidak terhambat dan unit usaha yang ada dapat berjalan dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

Blongkod,H.,&Rasjid,H.(2017).Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.*Skripsi*.

Brawijaya, P. E. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta Selatan: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).

Efendi, A. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara.

Hasanah,B.I.(2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Tinggagri Kalidawar Tulungagung.

Karta sasmita,G.(1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*.Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

Kusuma, & Citra,D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

Mubyarto.(1996). *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*.Yogyakarta: AdityaMedia.

Mujiono.(2017).Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggarahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Munaawaroh. (2019). Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

Muslim, A. (2009). *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta:Teras.

Puspayanti, Ni Luh Putu Ayu Dia. “*Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran Bumdes Untuk kemandirian Desa pada Desa di Kabupaten Jembrana*” e-Journal, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018.<https://openknowledgmaps.org>.

Rahmadanik, D. (n.d.). Peran BUMDes dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Cokro Kembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.*Skripsi*.

Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zamzami. (2009). *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Zubaidi. (201). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Kusuma,&Citra,D. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .Skripsi* .

Mubyarto.(1996). *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*.Yogyakarta: AdityaMedia.

Mujiono. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggarahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.Skripsi*.

Munaawaroh. (2019). *Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .Skripsi* .

Muslim, A. (2009). *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.

P,irma irawati dan Dina Kurniawati, *meningkatkan peran Bumdes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng*”, *Jurnal Abdiraja*, Vol 2, No. 2, September 2019. <https://app.dimensions.ai/discover/publication>.

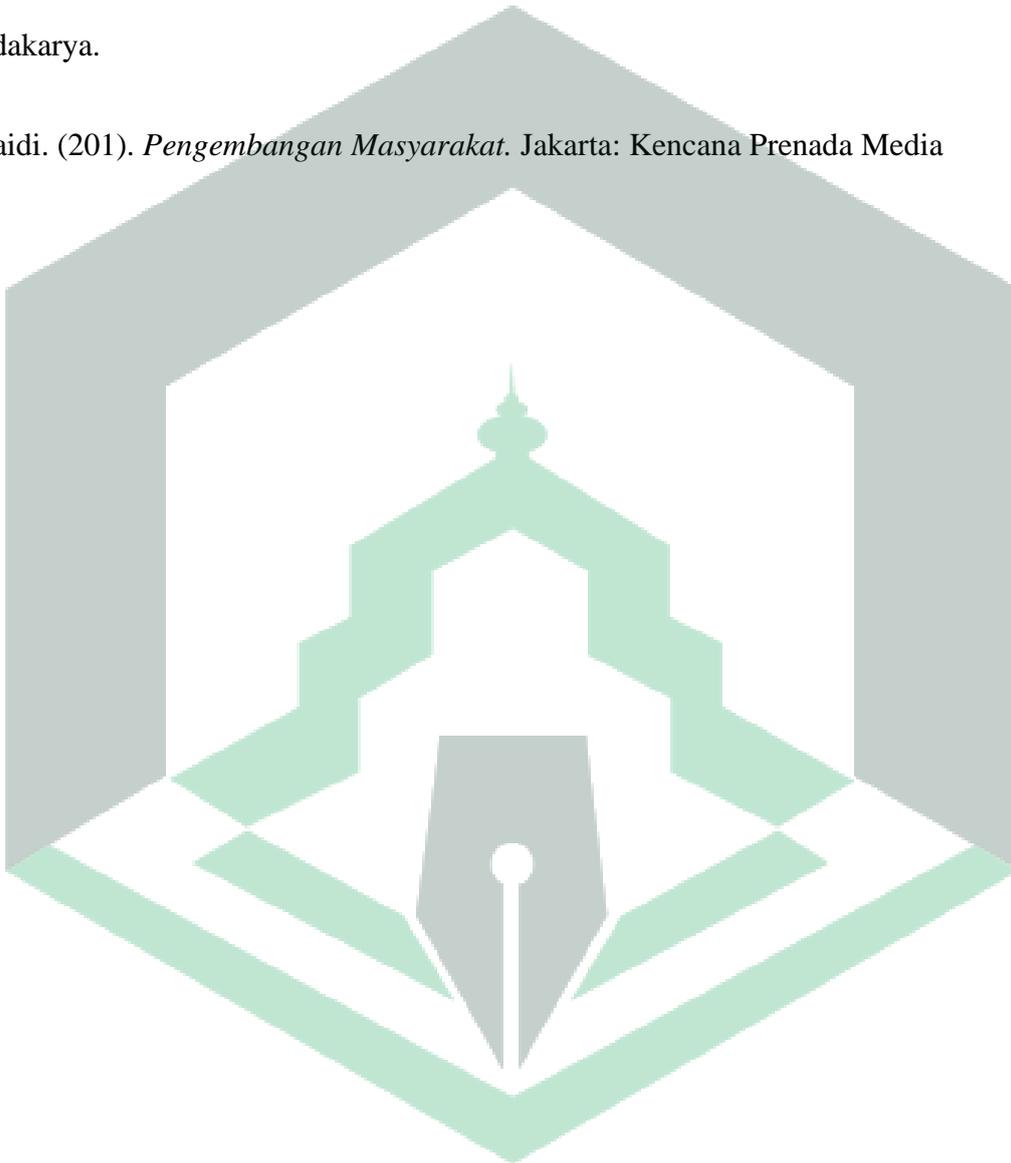
Rahmadanik, D. (n.d.). Peran BUMDes dalam pemberdayaan Masyarakat Desa

Cokro Kembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.*Skripsi*.

Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zamzami.(2009). *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Zubaidi. (201). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media





PEDOMAN OBSERVASI

KEPALA DESA

1. Sejarah BUMDes di desa pararra?
2. Kapan BUMDes aktif di desa pararra?
3. Berapa dana, Berasal dari mana dananya untuk keperluan apa saja?
4. Apa saja program dan kegiatan BUMDes di desa pararra?
5. Apa saja kendala yang di hadapi pemerintah, masyarakat maupun pengurus dalam menjalankan BUMDes?
6. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes?

PENGURUS BUMDes

1. Apa saja program yang ada di BUMDes?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam menjalankan usaha BUMDes?
3. Bagaimana cara mengatasi setiap permasalahan yang di hadapi oleh BUMDes?
4. Bagaimana penerapan kegiatan BUMDes terhadap perekonomian masyarakat?

MASYARAKAT

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang BUMDes?
2. Bagaimana pengelolaan BUMDes menurut bapak/ibu?
3. Bagaiman partisipasi bapak/ibu dalam kegiatan BUMDes?

4. Apa kah Usaha yang di jalankan oleh BUMDes sudah di ketahui bapak/ibu?
5. Jenis usaha apa yang di jalankan oleh BUMDes yang mampu meningkatkan perekonomian bapak/ibu?



PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber: 1. Kepala Desa Pararra

2. Pengelolah BUMDes TA DUNG MAUPA

3. Masyarakat Desa Pararra

No	Aspek	Pertanyaan	Narasumber		
			PD	PB	M
1	Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi	Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi?			
		Apa tujuan dari pemberdayaan ekonomi?			
		Apakah dengan adanya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa?			
		Bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes?			
		Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes?			
		Apakah dengan adanya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk terlibat langsung menyukseskan kegiatan BUMDes?			
2	Sasaran Pemberdayaan	Langkah seperti apa yang dilakukan agar pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes mampu menarik minat masyarakat?			

	Ekonomi	Bagaimana cara pengelolaan BUMDes melalui pemberdayaan ekonomi agar tertuju kepada masyarakat?			
--	---------	--	--	--	--

		Permasalahan seperti apa yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes kepada masyarakat?			
		Jika ada kendala dalam upaya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes langkah seperti apa yang dilakukan agar masalah dapat diselesaikan?			
3	Pendekatan Pemberdayan Ekonomi	Bagaimana cara agar pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes mampu diterima oleh masyarakat?			
		Apakah ada kendala yang dihadapi dalam upaya pendekatan kepada masyarakat?			
		Langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam upaya pendekatan kepada masyarakat?			
		Bagaimana antusias masyarakat dengan adanya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes?			

Keterangan : PD: Pemerintah Desa

PB: Pengelola BUMDes

M: Masyarakat









Wawancara dengan Masyarakat Desa Pararra

